



DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA PADANG PANJANG

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud Dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>Bab II Gambaran Pelayanan OPD</b> .....	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	19
2.2.1 Kepegawaian .....	19
2.2.2 Sarana dan Prasarana .....	21
2.2.3 Lahan Pertanian .....	28
2.2.4 Kelembagaan Tani .....	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	29
2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan .....	53
2.3.2 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan .....	57
2.3.3 Urusan Pilihan Bidang Pertanian .....	59
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .....	75
2.4.1 Tantangan .....	75
2.4.2 Peluang .....	76
2.5. Kelompok Sasaran Layanan .....	76
<b>Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pangan dan Pertanian</b> .....	<b>78</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	78
3.2. Telaahan Renstra Provinsi .....	80
3.2.1. Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat .....	80
3.2.2. Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat .....	83
3.2.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat .....	88

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah .....	100
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	101
<b>Bab IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....</b>	<b>103</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	103
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah .....	108
<b>Bab V Strategi dan Arah Kebijakan .....</b>	<b>109</b>
5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah .....	109
<b>Bab VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan</b>	<b>113</b>
<b>Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....</b>	<b>126</b>
<b>Bab VIII Penutup .....</b>	<b>133</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1. Jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Honor / Harian Lepas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022.....	19
2.2. Jumlah PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang menurut golongan.....	20
2.3. Jumlah PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan.....	20
2.4. Sarana dan Prasarana pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022.....	21
2.5. Luas Lahan Pertanian.....	28
2.6. Jumlah Organisasi Petani Kota Padang Panjang Tahun 2022.....	28
2.7. Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pangan dan Pertanian.....	30
2.8. Ketersediaan Energi Tahun 2018-2022.....	54
2.9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.....	55
2.10. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Padang Panjang.....	56
2.11. Pengujian Sampel Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	56
2.12. Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2022.....	57
2.13. Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan Tahun 2018-2022.....	58
2.14. Jumlah Produksi Perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022.....	59
2.15. Produksi Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang.....	60
2.16. Jumlah Teknologi Anjuran Yang Telah Diterapkan Tahun 2018-2022.....	62
2.17. Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2018-2022.....	62
2.18. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2018-2022.....	63
2.19. Anggaran dan Realisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.....	66
3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	78
3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	82

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 .....	85
3.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 .....	87
3.5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat .....	89
3.6. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 .....	92
3.7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 – 2026 .....	99
3.8. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	100
4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 .....	104
4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah .....	108
5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	110
6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang .....	114
7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah .....	127

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.....	18
2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah.....	108

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Sebagai upaya menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka dokumen rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mengacu kepada RPJMD Provinsi (Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat).

Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga

diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa pemenuhan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia diselenggarakan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras sebagai jenis makanan pokok utama. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi karbohidrat, protein, lemak dan vitamin. Sedangkan definisi pangan dalam Undang-Undang Pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Karena itu, Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang pemenuhan pangan seluruh rakyat sampai tingkat perseorangan dengan harga yang wajar (*food security*), namun juga memperjelas cara pencapaiannya, yaitu dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat (*food resiliency*); dan menentukan kebijakan pangan secara mandiri dan berdaulat (*food sovereignty*).

Salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan bahkan kemandirian pangan adalah dengan pembangunan pertanian secara menyeluruh. Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus dilaksanakan dalam upaya memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis sektor lain.

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan



pengembangan kelembagaan pertanian bersama-sama dengan sumberdaya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 disampaikan bahwa kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Dinas Pangan dan Pertanian, sebagai salah satu perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang wajib menyusun dokumen Renstra tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diharapkan dapat mengintegrasikan antara

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- 1-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
  9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
27. Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat,
30. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 73).
31. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan naskah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026;
2. Tersedianya dokumen yang mampu menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
3. Sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian untuk 3 (tiga) tahun mendatang; dan
4. Sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan pangan dan pertanian secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergis dengan bidang lain.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 ini adalah:

1. Sebagai upaya dalam menyusun tujuan dan sasaran serta strategi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
2. Sebagai pedoman bagi pejabat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dalam merumuskan kegiatan pelaksanaan program yang lebih realistis dalam skala prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang; dan
3. Menjabarkan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pangan dan Pertanian dengan memperhitungkan faktor internal dan eksternal dalam bentuk strategi, kebijakan dan program.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Instruksi Menteri Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, maka renstra Dinas Pangan dan Pertanian periode 2024-2026 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II     GAMBARAN PELAYANAN OPD**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.5. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

**BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Renstra Provinsi
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Daerah
- 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

**BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI    RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**

**BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII  PENUTUP**

## **BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN OPD**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pangan dan Pertanian dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Pangan dan Pertanian adalah melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, urusan pemerintahan bidang pangan, dan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.



Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan. Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan rencana kerja tahunan Dinas Pangan dan Pertanian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, bidang ketahanan pangan, bidang perikanan dan pelaksana penyuluhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai target kerja sesuai dengan rencana;
- c. membina bawahan dilingkup Dinas Pangan dan Pertanian dengan cara rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Dinas Pangan dan Pertanian sesuai tugas, tanggungjawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- g. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- h. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;

- i. merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- j. menyusun dan menetapkan system pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan public sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Pangan dan Pertanian dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dilingkup Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

## **3. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

#### **4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Produksi Peternakan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana, Prasarana Peternakan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

#### **5. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan**

Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pangan dan Pertanian di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan dan Pelaksanaan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perikanan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyuluhan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan Tani.

#### **6. Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan yang dikepalai oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Distribusi dan Harga Pangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.

## **7. UPTD**

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Walikota.

Berikut adalah UPTD yang berada di lingkup Dinas Pangan dan Pertanian:

### **a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan.

Untuk memenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Puskeswan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Hewan; dan
- b) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan.

#### **b. UPTD Balai Benih Ikan**

UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana operasional Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pembibitan benih ikan, pengujian dan persiapan teknologi di lapangan, pemasaran benih ikan, penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi, pembinaan terhadap Unit Pembenihan Rakyat (UPR) serta Pusat Pelatihan Pembenihan Ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut UPTD Balai Benih Ikan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pembenihan benih ikan;
- b) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
- c) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat pelatihan pembenihan ikan;
- d) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional penyediaan induk unggul dan ikan konsumsi;
- e) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional pusat agrowisata; dan
- f) Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Balai Benih Ikan.

UPTD Balai Benih Ikan susunan organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala UPTD; dan
- b. Sub Bagian Tata Usaha.

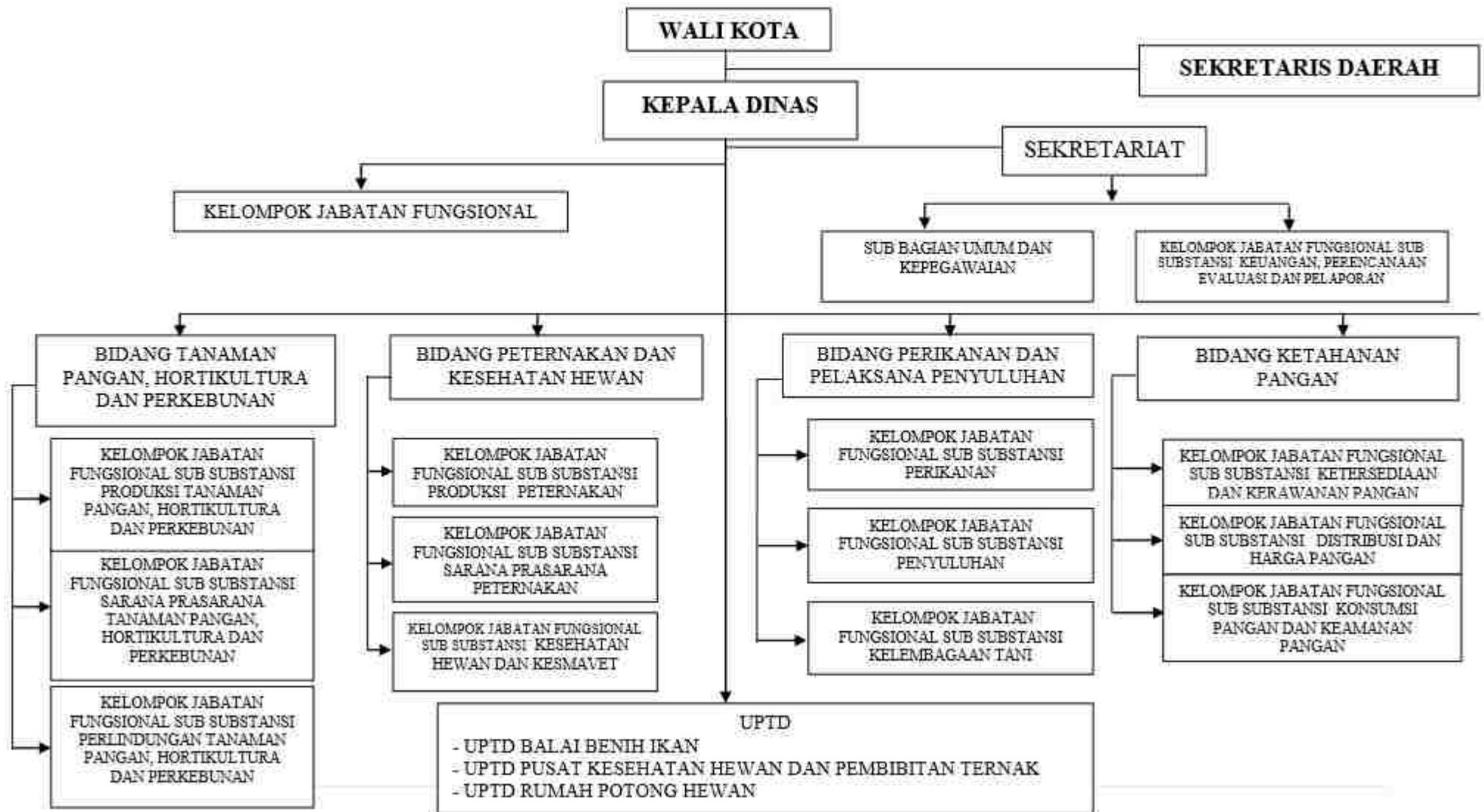
#### **c. UPTD Rumah Potong Hewan**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

Untuk memenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pendapatan, sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan; dan
- b. Perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis pengelolaan urusan administrasi UPTD Rumah Potong Hewan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG**





## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Kepegawaian

Kondisi pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel. 2.1.**  
**Jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Honor / Harian Lepas**  
**Dinas Pangan dan Pertanian**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2022**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	28	22	50
2	PPPK	3	1	4
3	Tenaga honor / harian lepas	27	19	46
	Jumlah	58	42	100

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Dari Tabel. 2.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah 100 (seratus) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 50 (lima puluh) orang, PPPK sebanyak 4 orang dan THL sebanyak 46 orang, dari jumlah tersebut apabila dibandingkan dengan kebutuhan pegawai masih kurang. Hal ini disebabkan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terdapat 3 UPTD yang langsung berurusan dengan pihak masyarakat. Kondisi saat ini masih ada sub koordinator pada masing-masing bidang yang belum mempunyai staf sehingga seluruh kegiatan hanya dikerjakan oleh sub koordinator yang bersangkutan.

Untuk Tenaga Harian Lepas (THL) yang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang terdiri dari THL sopir 3 (tiga) orang, THL penjaga kantor 3 (tiga) orang, THL petugas kebersihan 4 orang, THL petugas administrasi 14 orang, THL petugas pengelola TOGA 1 orang, THL petugas screen house 2 orang, petugas pengelola mess 2 orang, THL petugas teknis BBI 5 orang, THL pekerja rearing unit dan pembibitan 4 orang, THL petugs mutu pakan temak 1 orang, THL medik veteriner 1 orang, THL paramedis 1 orang, THL operator hoist 1 orang, THL petugas penyemblih hewan 1 orang, THL petugas bongkar muat daging 1 orang, THL yankeswan PDSR 1 orang, dan THL caraka 1 orang.

Berdasarkan golongan, komposisi PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada Tabel. 2.2.

**Tabel.2.2**  
**Jumlah PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang menurut golongan**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Golongan I	1	-	1	2
2	Golongan II	6	-	6	12
3	Golongan III	13	18	31	62
4	Golongan IV	8	4	12	24
	Jumlah	28	22	50	100

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Pada Tabel. 2.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian yang paling banyak adalah PNS golongan III sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Diikuti oleh PNS golongan IV berjumlah 12 (dua belas) orang, pegawai golongan II berjumlah 6 (enam) orang dan pegawai golongan I berjumlah 1 (satu) orang.

**Tabel. 2.3**  
**Jumlah PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang menurut tingkat Pendidikan Tahun 2022**

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	1	-	1	2
2	SLTP	1	-	1	2
3	SLTA	7	2	9	18
4	Sarjana Muda/D3	-	-	-	-
5	Sarjana (S1)	17	19	36	72
6	Pasca Sarjana (S2)	2	1	3	6
	Jumlah	28	22	50	100

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan PNS pada Dinas Pangan dan Pertanian cukup beragam, mulai dari SD sampai dengan Pasca Sarjana (S2). Jumlah pegawai yang terbanyak adalah dengan pendidikan S1 yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang. Pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 3 (tiga) orang, SLTA sebanyak 9 (sembilan) orang, SD sebanyak 1(satu) orang dan pegawai yang mempunyai pendidikan SLTP sebanyak 1 (satu) orang.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel 2.4 :

**Tabel. 2.4**  
**Sarana dan Prasarana pada Dinas Pangan dan Pertanian**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2022**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
	TANAH		
1.	Tanah Bangunan kantor (BPP Padang Panjang Timur)	1074 m <sup>2</sup>	
2.	Tanah Bangunan Kantor (UPTD RPH)	8000 m <sup>2</sup>	
3.	Tanah Bangunan Kantor (UPTD RPH)	12000 m <sup>2</sup>	
4.	Tanah Bangunan Kantor (UPTD BBI)	5368 m <sup>2</sup>	
5.	Tanah Bangunan Kantor (Dinas Pangan dan Pertanian)	888 m <sup>2</sup>	
6.	Tanah Bangunan Kantor (UPTD BBI)	12162 m <sup>2</sup>	
	BANGUNAN GEDUNG		
1.	Bangunan Kantor (RPH)	1 unit	Baik
2.	Bangunan Kantor (BBI)	1 unit	Baik
3.	Bangunan Kantor (Dinas)	1 unit	Baik
4.	Bangunan Kantor (BPP PPT)	1 unit	Baik
5.	Bangunan Kantor (BPP PPB)	1 unit	Baik
6.	Bangunan Kantor (Puskeswan)	1 unit	Baik
7.	Bangunan Gudang (Penangkar Benih)	1 unit	Baik
8.	Bangunan Gudang (Peralatan)	1 unit	Baik
9.	Bangunan Gudang (Pakan Puskeswan)	1 unit	Baik
10.	Bangunan Gudang (Peralatan BBI)	1 unit	Baik
11.	Bangunan Gudang (ruang genset dan pupuk BBI)	1 unit	Baik
12.	Bangunan Gudang (pakan BBI)	1 unit	Baik
13.	Bangunan Gudang (pasar benih ikan BBI)	1 unit	Baik
14.	Bangunan Gudang (tempat pendederan lele BBI)	1 unit	Baik
15.	Bangunan Gudang (tempat pendederan lele BBI)	1 unit	Baik
16.	Bangunan Bengkel Permanen (Hatchery)	1 unit	Baik
17.	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	2 unit	Baik
18.	Gedung pertokoan (rumah susu)	1 unit	Baik
19.	Bangunan Kandang	4 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
20.	Bangunan Negara Golongan III	4 unit	Baik
21.	Mess/Wisma/Bungalow	3 unit	Baik
22.	Bangunan Taman	4 unit	Baik
23.	WC/Toilet/Kamar mandi	2 unit	Baik
24.	Bangunan Bak Uba	2 unit	Baik
<b>ALAT-ALAT ANGKUTAN</b>			
1	Kendaraan Dinas roda 4 (kantor dan UPTD)	7 unit	Baik
2.	Kendaraan Dinas roda 2	44 unit	Baik
3.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5 unit	2 Baik, 3 Rusak berat
4.	Gerobak Dorong	1 unit	Baik
<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>			
1.	Auto Hoist	2 unit	Baik
2.	Mesin jahit terpal	1 unit	Baik
3.	Meteran kain	2 unit	Baik
4.	Timbangan	6 unit	Baik
<b>ALAT PERTANIAN</b>			
1.	Traktor tangan dengan perlengkapannya	8 unit	Baik
2.	Hand traktor	2 unit	Baik
3.	Tugal Besi	1 unit	Baik
4.	Ember perah	6 unit	Baik
5.	Mesin Pencacah Organik	1 unit	Baik
6.	Tang Pemasang/kar tang	2 unit	Baik
7.	Stick pengukur sapi	3 unit	Baik
8.	Container	2 unit	Baik
9.	Milk gam	14 unit	Baik
10.	Ice book (show case)	4 unit	Baik
11.	Cool book	4 unit	Baik
12.	Rak-rak penyimpan (meja deboning)	3 unit	Baik
13.	Alat laboratorium pertanian	6 unit	Baik
14.	Unit pengaduk	1 unit	Baik
15.	Alat tanam padi	4 unit	Baik
16.	Alat pembekuan (freezer)	5 unit	Baik
17.	Bak pemeliharaan sementara	10 unit	Baik
18.	Paddle whell aerator	6 unit	Baik
19.	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	8 unit	Baik
20.	Alat Semprot Hama	1 unit	Baik
21.	Alat Perontok (Theresar pedaf)	1 unit	Baik
22.	Mixer kompos pertanian	6 unit	Baik
23.	Cold Storage (Kamar Pendingin)	1 unit	Baik
24.	Rak-rak penyimpanan	1 unit	Baik
25.	Meja deboning	3 unit	Baik
26.	Gantungan Karkas	8 unit	Baik
27.	Segitiga Gantungan Karkas	2 unit	Baik
28.	Offal hanger	2 unit	Baik
<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>			
1.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
2.	Lemari Besi/Metal	23 unit	Baik
3.	Rak Besi/Metal	5 unit	Baik
4.	Rak Kayu	1 unit	Baik
5.	Filling Besi/Metal	27 unit	Baik
6.	Band Kas	1 unit	Baik
7.	Lemari Kaca	1 unit	Baik
8.	Brankas	1 unit	Baik
9.	Papan Visual	1 unit	Baik
10.	Alat Penghancur Kertas	1 unit	Baik
11.	Papan Nama Instansi	3 unit	Baik
12.	White Board	4 unit	Baik
13.	Mesin Absensi	9 unit	Baik
14.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5 unit	Baik
15.	Meja Biro	14 unit	Baik
16.	Mesin Potong Rumput	2 unit	Baik
17.	Rak-rak Penyimpanan	2 unit	Baik
18.	Layar Pentas	1 unit	Baik
19.	Proyektor	6 unit	Baik
20.	Lemari Kayu	23 unit	Baik
21.	Rak Kayu	1 unit	Baik
22.	Kursi Besi / Metal	4 unit	Baik
23.	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	26 unit	Baik
24.	Meja Rapat	56 unit	Baik
25.	Meja Makan	1 unit	Baik
26.	Meja Resepsion	1 unit	Baik
27.	Meja Panjang	3 unit	Baik
28.	Kursi Rapat	4 unit	Baik
29.	Kursi Tamu	5 unit	Baik
30.	Kursi Tangan	4 unit	Baik
31.	Kursi Putar	15 unit	Baik
32.	Bangku Tunggu	2 unit	Baik
33.	Kasur	46 unit	Baik
34.	Tenda	5 unit	Baik
35.	Meja 1/2 Biro	76 unit	Baik
36.	Sofa	2 unit	Baik
37.	Lemari Pakaian	2 unit	Baik
38.	Kursi Plastik	42 unit	Baik
39.	Rak Piring	1 unit	Baik
40.	Rak Buku	1 unit	Baik
41.	lemari sekat	1 unit	Baik
42.	Mesin Cuci	2 unit	Baik
43.	Lemari Es	11 unit	Baik
44.	AC Sentral	2 unit	Baik
45.	AC Unit	1 unit	Baik
46.	AC Split	6 unit	Baik
47.	Kipas Angin	6 unit	Baik
48.	Kompor Gas	3 unit	Baik
49.	Oven Listrik	2 unit	Baik
50.	Blender	1 unit	Baik
51.	Televisi	12 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
52.	Loudspeker	2 unit	Baik
53.	Sound System	7 unit	Baik
54.	Wireless	1 unit	Baik
55.	Microphone	2 unit	Baik
56.	Camera Film	4 unit	Baik
57.	Aquarium	1 unit	Baik
58.	Tangga Alumunium	3 unit	Baik
59.	Handy Cam	4 unit	Baik
60.	Alat Pemadam/portable	4 unit	Baik
61.	laptop	6 unit	Baik
62.	P.C. Unit	12 unit	Baik
63.	Laptop/Notebook	34 unit	Baik
64.	Net Book	1 unit	Baik
65.	Harddisk Eksternal	6 unit	Baik
66.	Monitor	2 unit	Baik
67.	Printer/Printer scanner	12 unit	Baik
68.	Scanner	1 unit	Baik
69.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	12 unit	Baik
70.	Lemari Buku untuk untuk Perpustakaan	4 unit	Baik
71.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1 unit	Baik
<b>ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI</b>			
1.	Proyektor + Attachment	6 unit	Baik
2.	Audio Amplifier	1 unit	Baik
3.	Sound System	3 unit	Baik
4.	Receiver VHF/FM	1 unit	Baik
5.	Kamera Bawah Air	2 unit	Baik
6.	Camera Digital	9 unit	Baik
7.	Faximile	2 unit	Baik
8.	Wireless Amplifier	2 unit	Baik
9.	Wireless	4 unit	Baik
10.	Antena SHF Portable	2 unit	Baik
11.	Sterilisator	1 unit	Baik
12.	Stetoscope	8 unit	Baik
13.	Timbangan Badan	10 unit	Baik
14.	Kandang isoLasi/observasi ukuran besar	80 unit	Baik
15.	Meja Mayo Stainless	2 unit	Baik
16.	Tabung Oksigen	8 unit	Baik
17.	Kit Pemeriksaan Sederhana	1 unit	Baik
18.	Syringe Pump	5 unit	Baik
19.	Instrument Trolley	3 unit	Baik
20.	Standar Waskom	3 unit	Baik
21.	Box X Ray	2 unit	Baik
22.	Lemari Instrument	3 unit	Baik
23.	Minor Surgical Set	8 unit	Baik
24.	Mikromotor	2 unit	Baik
25.	Tang	4 unit	Baik
26.	Speculum	2 unit	Baik
27.	Laryngoscope	1 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
28.	Apron	2 unit	Baik
29.	X Ray Developing Set	1 unit	Baik
30.	Operating Table	1 unit	Baik
31.	Respirator	8 unit	Baik
32.	USG	2 unit	Baik
33.	Centrifuge	1 unit	Baik
34.	Dry Oven	1 unit	Baik
35.	Operating lamp	1 unit	Baik
36.	Film Viewer	1 unit	Baik
37.	Senjata Bius (senapan angin oxigen)	2 unit	Baik
38.	HT (Handy Talky)	4 unit	Baik
39.	Milk Analyzer	1 unit	Baik
40.	Elektrik dehorner 220 V	2 unit	Baik
41.	PH Meter daging	2 unit	Baik
42.	Rubber stomach tube (alat bantu buang angin)	1 unit	Baik
43.	Syringe otomatis 1mm/Scorek	5 unit	Baik
44.	Container semen beku	3 unit	Baik
45.	Veteriner Monitor	1 unit	Baik
46.	Mask Veteriner	1 unit	Baik
47.	Alat pemotong bulu/rambut	10 unit	Baik
48.	Alat potong kuku lengkap	2 unit	Baik
49.	X-Ray Unit	1 unit	Baik
50.	Peralatan Bius inhalation	1 unit	Baik
51.	Peralatan Prolapsus bandage	5 unit	Baik
52.	Cow Lift (Pengangkat/bedon g sapi)	7 unit	Baik
53.	Hot cutter engel/alat potong listrik	3 unit	Baik
54.	Timbangan ternak digital dengan kerangkeng	5 unit	Baik
55.	Nurse Set	1 unit	Baik
56.	Grid (Column)	2 unit	Baik
57.	Kulkas Vaksin	1 unit	Baik
58.	Gum embrio trasfer	1 unit	Baik
59.	Kick Stoper for cow/alat pencegah penendang pada sapi	5 unit	Baik
<b>ALAT LABORATORIUM</b>			
1.	Timbangan Electronik	1 unit	Baik
2.	PH Meter	2 unit	Baik
3.	Incubator	1 unit	Baik
4.	Mikroskop Dengan Kamera	2 unit	Baik
5.	Lemari Labor	1 unit	Baik
6.	Lemari Steril	1 unit	Baik
7.	Autoclave	1 unit	Baik
8.	Thermometer	1 unit	Baik
9.	Bak Fiberglass	10 unit	Baik
10.	Laminar Air Flow	1 unit	Baik
11.	Rubber Blower	1 unit	Baik
12.	Freezer	4 unit	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
13.	Shaker	1 unit	Baik
14.	Refractometer	1 unit	Baik
15.	Magnetic Strires & Bars	3 unit	Baik
16.	P.H. Meter	2 unit	Baik
17.	Lemari Asam	1 unit	Baik
18.	Refrigerator	1 unit	Baik
19.	mixer	1 unit	Baik
20.	Hygrometer	1 unit	Baik
21.	Ion Meter	2 unit	Baik
22.	Mesin Pemanas	2 unit	Baik
23.	Pompa Airasil	7 unit	Baik
24.	Generator	5 unit	Baik
25.	Hot Plate Stirer	1 unit	Baik
26.	Alat Laboratorium Alat Pertanian A Lain-Lain	1 unit	Baik
27.	Sharp Knife	1 unit	Baik
28.	Ultra X Moisture meter	1 unit	Baik
29.	Soil Terter	1 unit	Baik
30.	Rod Blower	2 unit	Baik
31.	Aquarium	2 unit	Baik
32.	Dissetin set	1 unit	Baik
33.	Neraca Analystis Kalibrator	1 unit	Baik
34.	Mikroskop	4 unit	Baik
35.	Panci	3 unit	Baik
36.	Multi Parameter system	2 unit	Baik
37.	Haematology Analyzer	1 unit	Baik
38.	Soil PH Meter	2 unit	Baik
39.	DO Meter	2 unit	Baik
40.	Conductivity Meter	2 unit	Baik
41.	Water Quality Analyzer System	1 unit	Baik
42.	Automatic Dispenser	2 unit	Baik
43.	Pompa Peristaltik	2 unit	Baik
44.	Alat Laboratorium Lingkungan	1 unit	Baik
45.	Cool Box	5 unit	Baik
46.	Digital Ballace	1 unit	Baik
<b>ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN</b>			
1.	Alat Khusus SAR (Search and Resque)	8 unit	Baik
2.	CCTV (Indoor & Outdoor)	3 unit	Baik
3.	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1 unit	Baik

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

Dari Tabel 2.4 diatas terlihat bahwa Dinas Pangan dan Pertanian mengelola aset yang cukup beragam dengan jumlah yang cukup banyak. Terdapat tanah untuk bangunan kantor dengan penjelesaian sebagai berikut :



1. Kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terletak di jalan Ahmad Yani No 30 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang.
2. Kantor UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dibangun pada tahun 2011 dan terletak di kawasan RPH Kelurahan Silaing Bawah. Kantor ini dilengkapi dengan fasilitas peralatan laboratorium kesehatan hewan, fasilitas pelayanan kesehatan hewan dan penyediaan bibit sapi perah unggul melalui program Rearing Unit.
3. UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) dengan luas 2 ha terletak di Kelurahan Silaing Bawah dan baru direnovasi pada tahun 2016 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. UPTD RPH ini sudah dilengkapi dengan sarana prasarana pemotongan sesuai dengan standar dan sudah dilengkapi dengan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) serta pemotongan sesuai syariat Islam.
4. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) dengan luas 2 ha terletak di Gajah Tanang Kelurahan Ekor Lubuk. Balai Benih Ikan ini sudah memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) untuk komoditas Ikan Nila serta dilengkapi dengan fasilitas laboratorium kualitas air, ruang pertemuan dan mess/tempat penginapan. Mess atau tempat penginapan memiliki 11 kamar dengan kapasitas huni sebanyak 44 orang yang digunakan untuk mendukung fungsi BBI sebagai pusat pelatihan perikanan dan juga dapat digunakan untuk kepentingan umum.
5. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Padang Panjang Barat yang berlokasi di kawasan RPH Kota Padang Panjang Kelurahan Silaing Bawah.
6. Kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Padang Panjang Timur yang berlokasi di ex. Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang Panjang Kelurahan Silaing Ganting.

Dari segi peralatan kerja, terdapat beberapa aset yang memiliki fungsi spesifik serta memerlukan pemeliharaan yang khusus. Peralatan tersebut berupa peralatan kedokteran dan alat-alat laboratorium. Disamping itu untuk keperluan operasional rumah potong hewan dan pelayanan di puskeswan terdapat beberapa aset yang bernilai besar. Jumlah dan jenis aset yang banyak dan beragam dan spesifik tentunya membutuhkan pengelolaan baik dan dengan jumlah serta kualitas SDM yang memadai.

Dari segi jumlah kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian sudah mencukupi, tetapi dari segi kelayakan operasional banyak yang tidak layak yang disebabkan tahun produksi yang terlalu lama (rusak berat dan rusak sedang).

### 2.2.3. Lahan Pertanian

Untuk menunjang keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian juga sangat dipengaruhi oleh lahan yang tersedia sebagai sarana peningkatan produksi pertanian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 luas lahan pertanian adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Luas Lahan Pertanian**

No	Lahan Pertanian	Luas (Ha)
1	Sawah	552
2	Perkebunan	264
3	Perikanan	87

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Berdasarkan data di atas luas lahan sawah seluas 552 ha, perkebunan seluas 264 ha dan perikanan seluas 87 ha.

### 2.2.4. Kelembagaan Tani

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, juga sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok organisasi petani sebagai pelaku usaha pertanian dengan data sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Jumlah Organisasi Petani Kota Padang Panjang Tahun 2022**

No	Organisasi Petani	Jumlah
1	Kelompok Tani	145
2	Gabungan Kelompok Tani	17
3	Kelompok Perikanan	44

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Jumlah kelompok tani di Kota Padang Panjang sebanyak 145 kelompok dan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) sebanyak 17 kelompok serta kelompok perikanan sebanyak 44 kelompok.

### **2.3. Kinerja Pelayanan OPD**

Menjelaskan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian, terdapat satu urusan wajib yaitu urusan pangan dan dua urusan pilihan yaitu urusan bidang pertanian dan urusan bidang kelautan dan perikanan. Urusan pangan merupakan urusan wajib dengan kategori non pelayanan dasar. Adapun Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pangan dan Pertanian

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target BPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	8	9	10	11		14	15	16	17	20	21	22	23	24	
<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>																			
1	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan				3,00%	3,17%				3,60%	3,29%				119,67%	40,89%			
2	Suku Pula Pangan Harapan (SPH)				88	88,26				80,20	88,50				94,56%	100,41%			
3)	Pencapaian Angin Keadayaan Energi (AKE)				100%	100%				94,6%	92,6%				94,60%	92,50%			
2)	Pencapaian Angin Keadayaan Protein (AKP)				100%	100%				101,9%	100,73%				101,90%	100,73%			
(1)	Jumlah uji sampel keamanan pangan				1 Kali	2 Kali				1 Kali	-				100%	-			
(2)	Jumlah analisis keamanan pangan yang dilaksanakan				1 Kali	2 Kali				1 Kali	-				100%	-			
(3)	Jumlah buku pola pangan beragam yang disusun				10 Buku	-				10 Buku	-				100%	-			
(4)	Jumlah pelatihan pemantauan pelaksanaan yang dilaksanakan				4 Kali	2 Kali				4 Kali	1 Kali				100%	50%			
(5)	Jumlah booth pameran pelaksanaan				1 Kali	1 Kali				1 Kali	-				100%	-			
(6)	Jumlah kelompok mandiri pangan yang dibentuk				2 Kelompok	3 Kelompok				2 Kelompok	-				100%	-			
(7)	Jumlah paket bahan yang tersedia				50 Paket	-				50 Paket	-				100%	-			
(8)	Jumlah dokumen HBL (Formulir Bahan Makanan) dan buku catatan keamanan pangan				2 Dokumen	2 Dokumen				1 Dokumen	-				50%	-			
(9)	Jumlah pelatihan/ pertemuan pengolahan pangan pangan pengolahan hasil pertanian				10 Orang	-				10 Orang	-				100%	-			
(10)	Jumlah Pengamatan Pupuk dan Fertilisida				4 Kali	-				4 Kali	-				100%	-			
(11)	Jumlah Petas LPGB yang disediakan				1 Petas	-				-	-				-	-			

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
(12)	Jumlah Pasopda/Persewa yang ditaman				1 Dokumen	-					-	-					-	-						
(15)	Jumlah endangon/pangan pemerintah					-	10 Ton				-	-					-	-						
(14)	Jumlah buku pola pangan harapan yang ditaman					-	20 Buku				-	20 Buku					-	100%						
(15)	Jumlah pelatihan yang dilakukan					2 Kali	2 Kali				2 Kali	-					100%	-						
(16)	Jumlah Keikutsertaan RFB Dk. Provinsi dan Dk. Nasional					2 Kali	2 Kali				2 Kali	-					100%	-						
(17)	Jumlah pemantauan harga pangan pokok Kota Padang Panjang					104 Kali	96 Kali				104 Kali	339 Kali					100%	323%						
2	Produksi susu sapi					394.000 liter/tahun	414.000 liter/tahun				394.720 liter/tahun	326.306 liter/tahun					100,18%	81,79%						
3)	Persentase penurunan penyakit ternak/ hayati					5%	7%				6%	7%					100,00%	100,00%						
(1)	Jumlah penggunaan obat-obatan hewan dan vaksin rabies					100 Jenis	100 Jenis				108 Jenis	82 jenis					108,00%	82,00%						
(2)	Jumlah pemeliharaan hewan quatern					700 Ekor	650 Ekor				599 Ekor	575 Ekor					85,57%	82,46%						
(3)	Jumlah pemangkapan Hama/Fenalar					170 Ekor	160 Ekor				182 Ekor	95 Ekor					107,06%	54,56%						
(4)	Jumlah uji sampel					182 Sampel	200 Sampel				720 Sampel	320 Sampel					375,00%	160,00%						
(5)	Jumlah Penanggulangan Qanqun					90 Ekor	70 Ekor				93 Ekor	120 Ekor					103,33%	171,43%						
(6)	Jumlah vaksinasi RFB					1.400 Ekor	1.500 Ekor				1.505 Ekor	1558 Ekor					107,50%	105,87%						
(7)	Jumlah pengobatan pelayanan ternak/ hayati					550 Pelayanan	585 Pelayanan				556 Pelayanan	3065 Pelayanan					100,65%	311,17%						
(8)	Jumlah Kasus Zoonosis					3 Kasus	2 Kasus				3 Kasus	1 Kasus					100,00%	60,00%						
2)	Peningkatan Produktivitas Peternakan / Produk Peternakan					5%	6%				5,10%	6%					102,00%	100,00%						
(1)	Jumlah produk olahan susu yang masuk ke pasar formal					1 Produk	1 Produk				1 Produk	1 Produk					100,00%	100,00%						
(2)	Jumlah bibit ternak sapi perah pada rearing unit					50 Ekor	40 Ekor				50 Ekor	15 Ekor					100,00%	37,50%						
(3)	Jumlah kelahiran ternak hasil IB					210 Ekor	250 Ekor				210 Ekor	111 ekor					100,00%	44,40%						
(4)	Jumlah sapi pembibitan					11 Ekor	2 Ekor				11 Ekor	7 Ekor					100,00%	350,00%						

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24					
(5)	Jumlah bbm miskin yang dibantu				14 KK	-				17 KK	-				121,43%	-			
(6)	Jumlah pusat agribisnis pemerintah				1 Unit	1 Unit				2 Unit	2 Unit				200,00%	200,00%			
(7)	Jumlah Livestock Expo yang diluncurkan				1 Kali	1 Kali				1 Kali	-				100,00%	-			
(8)	Festival susu				-	1 Kali				-	-				-	-			
(9)	Jumlah acara dan pameran pemerintah				2 Unit	2 Unit				2 Unit	2 Unit				150,00%	100,00%			
(10)	Jumlah sertifikat produk susu				3 Produk	2 Produk				1 Produk	1 Produk				33,33%	50,00%			
(11)	Jumlah tugas opini paruh / atau				-	2 Unit				-	-				-	-			
3	Peningkatan produktivitas ternak				17.222.000 rupiah/tahun/RTF	18.082.100 rupiah/tahun/RTF				20.187.840 rupiah/tahun/RTF	18.590.000 rupiah/tahun/RTF				117,32%	102,76%			
3)	Jumlah Produksi Budidaya Ikan				490 Ton	630 Ton				719,69 Ton	683,7 Ton				110,57%	100,64%			
(1)	Jumlah acara dan pameran, pameran (operasional BSI)				6 Jenis	6 Jenis				6 Jenis	6 Jenis				100,00%	100,00%			
(2)	Jumlah bidang DAI yang dilaksanakan				1 Bidang	1 Bidang				1 Bidang	1 Bidang				100,00%	100,00%			
(3)	Jumlah Forum Peningkatan Kelembagaan Komunitas Ternak Nasional (FORKAM) di Kota Padang Panjang dan Pariaman				3 Kali	3 Kali				3 Kali	2 Kali				100,00%	66,67%			
4	Produksi padi				6624 ton	6790 ton				9210,6 ton	8587 ton				147,88%	126,77%			
E	Pencapaian keberlanjutan Minter kawasan desa				5%	28%				5%	6%				100,00%	20,00%			
1)	Produksi Tanaman Hias				73.847 Tangkai	76.062 Tangkai				77.600 Tangkai	79641 Tangkai				106,08%	100,76%			
2)	Produktivitas Padi				5,7 Ton/ Ha	6,8 Ton/ Ha				6,1 Ton/ Ha	6,9 Ton/ Ha				107,02%	100,00%			
3)	Luas Lahan Pertanian Organik				9,7 Ha	1 Ha				0 Ha	1Ha				-	100,00%			
4)	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan				1 Tahun	-				1 Tahun	-				100,00%	-			
(1)	Jumlah kegiatan ternak florikultura				1 Kali	-				1 Kali	-				100,00%	-			
(2)	Jumlah DAI bidang pertanian				1 Bidang	-				1 Bidang	-				100,00%	-			
(3)	Jumlah labor kultur jaringan yang beroperasional				-	1 unit				-	1 unit				-	100,00%			

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsai OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-								
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
(4)	Jumlah penanaman tanaman hias yang dilaksanakan				-	1 Ha				-	1 Ha				-	100,00%							
(5)	Jumlah pengembangan pertanian organik yang dilaksanakan				-	1 Ha				-	1 Ha				-	100,00%							
(6)	Jumlah peserta pelatihan operator alat-alat				-	30 Or				-	-				-	-							
(7)	Jumlah pengujian pupuk dan pestisida yang dilaksanakan				-	3 Kali				-	12 Kali				-	600,00%							
(8)	Jumlah peserta Belalah Layang Pengendalian Hama Terpadu (BL- PHT)				-	20 Or				-	-				-	-							
(9)	Jumlah tenaga pembela tanaman				-	2 Or				-	-				-	-							
(10)	Jumlah peserta pelatihan teknologi hasil yang dilaksanakan				-	15 Orang				-	-				-	-							
(11)	Jumlah tunas yang dicera, pengalihan lahan, pemeliharaan tanaman hias				-	1 Diker				-	-				-	-							
(12)	Jumlah kegiatan manajemen pengembangan komoditi tanaman hias (demplot tanaman hias)				-	5 Or				-	-				-	-							
(13)	Jumlah ferfil dan panda hinga				-	-				-	-				-	-							
(14)	Jumlah DAK Bidang Pertanian				-	1 Bidang				-	1 Bidang				-	100,00%							
II	Angka Keberhasilan Tindakan				0,46%	6,07%																	
E	Persentase Peningkatan Penyuluhan Petani Pasarina Hiasan				3%	8%				-	10%				-	100,00%							
3)	Persentase Masyarakat Miskin yang bergarak di sektor pertanian menarima Bantuan Pasarina				38%	47%				-	47%				-	100,00%							
(1)	Jumlah EK risika yang dibantu				-	13 Or				-	-				-	-							
10)	Pengalaman Pelatihan (Dapat Beli Masyarakat)				10,29%	10,32%																	

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
7	Pencapaian Peningkatan Fasilitasan Petani				10%	30%				10%	38%				100,00%	120,00%								
3)	Pencapaian cakupan Fasilitasan Kebudayaan Pertanian dan Pachmanan				56,08%	56,67%				56,54%	66,57%				100,86%	100,00%								
(1)	Jumlah pelatihan kelempok tani terpatriasi				3 Kelempok	3 Kelempok				3 Kelempok	-				100,00%	-								
(2)	Jumlah peserta pertanian kelempok tani				1000 Or	1.500 Or				1.200 Or	-				120,00%	-								
(3)	Jumlah FGDAS Tani Tinglat Dominan di Fulang				-	1 Kali				-	-				-	-								
(4)	Jumlah fieldy kelembagaan tani				-	1 Kali				-	-				-	-								
(5)	Jumlah teknologi yang akan diterapkan				-	2 Jenis				-	2 Jenis				-	100,00%								
(6)	Jumlah fieldy penerapan pertanian teknologi tepat guna				-	1 Kali				-	-				-	-								
(7)	Jumlah tani kelas pawulu				-	1 Kali				-	-				-	-								
(8)	Jumlah pelatihan budidaya pertanian				-	1 Kali				-	-				-	-								
3)	Pencapaian penerapan pelayanan administrasi pachmanan				100%	100%				100%	100%				100,00%	100,00%								
(1)	Jumlah materi				1.000 Buah	-				975 Buah	-				97,50%	-								
(2)	Jumlah tagihan retribusi telepon, air dan listrik yang dibayarkan				56 Tagihan	-				56 Tagihan	-				100,00%	-								
(3)	Jumlah kendaraan operasional yang terpakaian				54 Unit	61 Unit				51 Unit	61 Unit				94,44%	100,00%								
(4)	Jumlah tenaga kebersihan				25 Orang	7 Orang				21 Orang	7 Orang				84,00%	100,00%								
(5)	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan				50 Jenis	-				50 Jenis	-				100,00%	-								
(6)	Jumlah barang estesia dan jumlah fotocopy yang disediakan				10 Jenis	-				10 Jenis	-				100,00%	-								
(7)	Jumlah mesin dan mesin rapot yang tersedia				1.350 Or	1.800 Or				1.500 Or	550 Or				111,11%	30,56%								
(8)	Jumlah bahan tertana dalam rapot laccidansi dan kebersihan dan luar daerah				285 Or	285 Or				180 Or	238 Or				63,02%	80,00%								



No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsai OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
(9)	Jumlah tenaga administrasi, teknis pelaksanaan yang disiapkan				25 Orang	27 Orang				25 Orang	26 Orang				89,28%	97,30%								
(10)	Jumlah komponen listrik yang tersedia				10 Jenis	-				10 Jenis	-				100,00%	-								
(11)	Jumlah materi				-	1000 Buah				900 Buah	-				-	0,00%								
(12)	Jumlah formasi jabatan dan Jumlah Etcopert yang disediakan				-	20 Jenis				22 Jenis	-				-	0,00%								
(13)	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan				-	50 Jenis				32 Jenis	-				-	64,00%								
(14)	Jumlah Laporan capaian kinerja keuangan dan indikator realisasi lainnya keuangan OPD, laporan keuangan tahunan, laporan progres realisasi anggaran dan laporan akhir tahun				-	3 Laporan				7 Laporan	-				-	0,00%								
(15)	Jumlah perencanaan, laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja OPD, RAN, LKJP, LKPI, LPPD, SPSP, DAK, pelaksanaan lainnya, laporan realisasi kegiatan fisik dan keuangan belanja modal/ pengabdian masyarakat dan jasa				-	14 Laporan				26 Laporan	-				-	0,00%								
(16)	Jumlah kegiatan pelatihan telepon, air dan listrik yang dilaksanakan				-	86 Kegiatan				-	144 Kegiatan				-	160,00%								
(17)	Jumlah komponen listrik yang tersedia				-	20 Jenis				-	25 Jenis				-	250,00%								
2)	Pemenuhan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan				100%	100%				100%	100%				100,00%	100,00%								
(1)	Jumlah rehab gedung kantor yang dilaksanakan				-	2 Unit				-	2 unit				-	100,00%								
(2)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				7 Unit	-				7 Unit	-				100,00%	-								
(3)	Jumlah sertifikat tanah pemerintah daerah yang diperoleh				1 Sertifikat	1 Sertifikat				2 Sertifikat	-				200,00%	-								

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-										
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023						
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
(4)	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpeliharasi				4 Jenis	-				4 Jenis	-					100,00%	-								
(5)	Jumlah pelaksanaan gedung kantor yang tersedia				-	10 Jenis				-	-					-	-								
(6)	Jumlah gedung kantor yang terpeliharasi				-	7 Unit				-	8 Unit					-	88,71%								
(7)	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpeliharasi				-	4 Unit				-	4 Jenis					-	100,00%								
(8)	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia				100%	100%				-	-					-	-								
(1)	Jumlah operator mangrove bimbel				8 Orang	10 Orang				-	-					-	-								
4)	Pencapaian perencanaan dan laporan capaian kinerja dan kesungguhan dan ditampilkannya target nyata				100%	-				100%	-					100,00%	-								
(1)	Jumlah perencanaan, laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja OPD, Baku, LKJp, LKJf, LPD, SPJP, Penetapan Kinerja				12 Laporan	-				8 Laporan	-					66,67%	-								
(2)	Jumlah Laporan capaian kinerja kesungguhan dan indikator realisasi kinerja kesungguhan OPD, laporan kesungguhan, laporan program realisasi anggaran dan laporan akhir tahun				8 Laporan	-				12 Laporan	-					150,00%	-								
<b>REKAPITULASI PERUBAHAN</b>																									
1	Luas pertanaman tanaman rakyat pertanian, kehutanan dan perikanan						2,64%	2,74%	2,41%				4,99%											194,92%	
2	Produksi ikan asin						298.637 liter/tahun	-	-				298.902 liter/tahun											101,73%	-
3	Produktivitas ikan asin						-	11,3 liter/ekor/hari	11,6 liter/ekor/hari				-	11,67 liter/ekor/hari										104,30%	
3)	Pencapaian Perencanaan Berupa Perencanaan						60%	65%	70%				70%	75%										126,00%	116,38%
(1)	Jumlah Biji Renceng Unit dan Penyalutan						19 ekor	11 ekor	6 ekor				19 ekor	12 ekor										100,00%	109,09%

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsai OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-							
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
(2)	Jumlah Produk Olahan susu yang masuk ke pasar formal						1 produk	1 produk	1 produk				1 produk	1 produk				100,00%	100,00%			
1	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pemeliharaan						15 ekor	11 ekor	5 ekor				19 ekor	12 ekor				100,00%	109,09%			
2	Jumlah Petugas Kandang Pemeliharaan						-	4 orang	4 orang				4 orang	4 orang				100,00%	100,00%			
3	Jumlah Tenaga Fungsional Mutu Produk ternak						-	1 orang	1 orang				1 orang	1 orang				100,00%	100,00%			
4	Jumlah Pengumpulan Laba Bersih, Biaya Ternak, Bahan Pakan / Pakan / Ternak an Benda Kacil							1 laporan	1 laporan	1 laporan			1 laporan	1 laporan				100,00%	100,00%			
5	Jumlah Produk Olahan Susu yang masuk ke Pasar							1 produk	1 produk	1 produk			1 produk	1 produk				100,00%	100,00%			
3)	Persentase Pemanfaatan Pasar Pasar							60%	65%	70%			70%	75%				126,00%	116,38%			
(1)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar							3 unit	1 unit	3 unit			-	1 unit				-	100,00%			
(2)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pasar							3 unit	3 unit	3 unit			3 unit	1 unit				100,00%	33,33%			
1	Jumlah Petugas Tenaga Administrasi Selektoris / Bidang/ Pegawai / Kegiatan (Bidang Pemasaran dan Kesehatan Hewan, UPFD Futuristik dan UPFD RPH)							-	5 orang	5 orang			-	5 orang				-	100,00%			
2	Jumlah Pemasaran Pemasaran Lainnya yang Didukung, Covabilitas dan Dipasarkan							5 unit	3 unit	5 unit			5 unit	1 unit				100,00%	33,33%			
(3)	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB							50 ekor	50 ekor	75 ekor			66 ekor	57 ekor				110,00%	114,00%			
(4)	Jumlah Ebit Ternak Sapi Perah pada Rearing Unit							19 ekor	11 ekor	6 ekor			19 ekor	12 ekor				100,00%	109,09%			
1	Jumlah Ebit Ternak Sapi Perah pada Rearing Unit							15 ekor	11 ekor	5 ekor			19 ekor	12 ekor				100,00%	109,09%			
2	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB							50 ekor	50 ekor	75 ekor			66 ekor	57 ekor				110,00%	114,00%			

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-							
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Jumlah Wilayah Sumber Sifat Ternak dan Rumpun/Olas Ternak yang Disterilisasi dan Dimanajemen						1 laporan	1 laporan	1 laporan				1 laporan	1 laporan				100,00%	100,00%			
3)	Persentase Fasilitasi Penyakit Ternak/Hasem/ Hewan						7%	7,6%	8%				16,17%	39,93%				216,71%	632,37%			
(1)	Persentase Pelayanan Medis Veteriner						100%	100%	100%				100%	100%				100,00%	100,00%			
1	Jumlah Kasus Zoonosis yang mengalami Fasilitasi						1 kasus	1 kasus	1 kasus				1 kasus	1 kasus				100,00%	100,00%			
2	Jumlah Peningkatan Omsetnya Reproduksi						35 ekor	35 ekor	35 ekor				35 ekor	39 ekor				100,00%	111,43%			
3	Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan						999 pelayanan	999 pelayanan	1000 pelayanan				1837 pelayanan	2833 pelayanan				194,87%	281,71%			
4	Jumlah Tenaga Teknis Farmasi, Yankes dan PDR						3 orang	2 orang	3 orang				3 orang	2 orang				100,00%	100,00%			
5	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Peningkatan Penyakit Hewan dan Zoonosis						1 laporan	1 laporan	1 laporan				1 laporan	1 laporan				100,00%	100,00%			
6	Jumlah Peningkatan Hewan Perairan Rabies (HPR)						25 ekor	45 ekor	35 ekor				15 ekor	11 ekor				64,00%	24,44%			
(8)	Jumlah Jenis Pengobatan Obat-Obat Hewan dan Vaksin Rabies						60 jenis	60 jenis	65 jenis				60 jenis	65 jenis				100,00%	100,00%			
1	Jumlah Hewan yang Divaksinasi Rabies						1200 ekor	1200 ekor	1200 ekor				1301 ekor	1001ekor				158,92%	83,42%			
2	Jumlah Wilayah yang Mengalami Fasilitasi Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Distrik Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Distrik Kabupaten/Kota						1 laporan	1 laporan	1 laporan				-	-				-	-			
(2)	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PKKHAWAN)						-	100%	100%				-	100%				-	100,00%			
1	Jumlah Tenaga Teknis Medis Veteriner (Dokter Hewan)						-	1 orang	1 orang				-	1 orang				-	100,00%			

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-								
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2	Jumlah Dana Pendamping Laksanakan Pertanian						-	1 tahun	1 tahun				-	1 tahun						-	100,00%		
(3)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner						-	1 laporan	1 laporan				-	1 laporan						-	100,00%		
(4)	Jumlah Livestock Expo yang diikuti						-	1 kali	1 kali				-	-						-	-		
(5)	Jumlah Sertifikasi Produk Susu							1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat				1 Sertifikat	-						100,00%	-	
1	Jumlah Livestock Expo yang diikuti						-	1 kali	1 kali				-	-						-	-		
2	Jumlah Sertifikat Produk Susu							1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat				1 Sertifikat	-						100,00%	-	
3	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan							1 laporan	1 laporan	1 laporan				1 laporan	-						100,00%	-	
4	Jumlah Pemeliharaan Hewan Qurban							600 ekor	600 ekor	600 ekor				665 ekor	673 ekor							114,17%	112,17%
5	Jumlah Uji Sampel							200 sampel	200 sampel	200 sampel				460 sampel	661 sampel							230,00%	330,50%
6	Jumlah Petugas Teknis (Petugas Operator, Hilot, Petugas Penyembelih Hewan, Petugas Bongkar Hilot Daging)							3 orang	3 orang	3 orang				3 orang	3 orang							100,00%	100,00%
7	Jumlah Pengawasan Personel Hewan dan Produk Hewan							1 laporan	1 laporan	1 laporan				1 laporan	1 laporan							100,00%	100,00%
3	Peningkatan produktivitas ikan							12.937.256 rupiah/tahun/RIP	-					30.098.876 rupiah/tahun/RIP	-							106,88%	-
4	Angka Konsumsi Dasi							-	36 kg/orang/tahun	36 kg/orang/tahun				-	41,82 kg/orang/tahun							119,48%	
(3)	Persentase Peningkatan Produktivitas Budidaya Perikanan							3%	5%	7%				3,19%	5%							106,33%	100,00%
(1)	Jumlah Produksi Perikanan							700 Ton/ Tahun	736 Ton/ Tahun	760 Ton/ Tahun				706,85 Ton/ Tahun	736,80 Ton/ Tahun							100,78%	100,07%
1	Jumlah Sarana dan Peralatan Perikanan yang disediakan							6 jenis	6 jenis	6 jenis				6 jenis	6 jenis							100,00%	100,00%
2	Jumlah Tenaga Pendukung Operasional BSI							7 orang	7 orang	7 orang				7 orang	7 orang							100,00%	100,00%



No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsai OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-								
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
(C)	Lana Lahan Pertanian Organik						1 ha	1 ha	1 ha				1 ha	1 ha						100,00%	100,00%		
1	Jumlah Pengolahan Sapuk dan Fertilisa							12 kali	12 kali	12 kali				12 kali	12 kali					100,00%	100,00%		
2	Jumlah Pendampingan Penggunaan Bermana Pembalung Pertanian							1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan					100,00%	100,00%		
3	Jumlah Labor Kultur Jaringan yang Banyarasi							1 unit	1 unit	1 unit				1 unit	1 unit					100,00%	100,00%		
4	Lana Lahan Pembinaan Tanaman Hias yang Dibekannakan						-	1 ha	1 ha				-	1 ha						-	100,00%		
5	Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Tanaman yang Dibekannakan						-	20 orang	20 orang				-	20 orang						-	100,00%		
6	Jumlah Petugas Screen Hama dan Tanaman Hama / Labor Kultur Jaringan						-	2 orang	2 orang				-	2 orang						-	100,00%		
7	Jumlah Petugas Tanggap Administrasi Selamatan / Bidang / Program / Kegiatan (Petugas Administrasi Bidang TPHP)						-	1 orang	1 orang				-	1 orang						-	100,00%		
8	Jumlah Peserta Studi Komparasi ke Daerah Pemas Pertanian						-	10 orang	10 orang				-	10 orang						-	100,00%		
9	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hama / Tanaman							1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen					100,00%	100,00%		
2)	Persentase Penerapan Pemasaran Pertanian							66%	70%	76%				66,0%	75%					100,00%	107,14%		
(I)	Lana Lahan Pertanian Pngas Berkesinambngan (LP2B)						-	147,06 ha	147,06 ha				-	147,06 ha						-	100,00%		
1	Jumlah Peserta Socialisasi Program Lahan Pertanian Fungsai Berkesinambngan (LP2B)						-	250 orang	250 orang				-	250 orang						-	14,25%		

No	Indikator Kinerja asasni Tugan dan Fungsai OPD	Target SFM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-																		
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5														
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023														
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25											
2	Lahan Pertanian : Fungsai Berkelanjutan/LP2B, Kamunai Pertanian: Fungsai Berkelanjutan/EP2B dan Lahan Cudatagai Pertanian Fungsai Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola							Rencana Glisai Fungsai dan Partisipasi Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026	1 ha	1 ha					1 ha									-	100,00%								
(2)	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Udaha Tani dan Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Udaha Tani																									-	100,00%						
(3)	Jumlah Jenis Pasaraya yang Dibangun																									-	100,00%						
1	Jumlah Perencanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tercier																									-	100,00%						
2	Jumlah Pengeranaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tercier																									-	100,00%						
3	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Udaha Tani																									-	100,00%						
4	Jumlah Jaringan Irigasi Udaha Tani yang Dibangun, Derehabilitasi, dan Dipelihara																									-	100,00%						
5	Jumlah Pasar Jalan Udaha Tani yang Dibangun																									-	100,00%						
6	Jalan Udaha Tani yang Dibangun, Derehabilitasi dan Dipelihara																									-	100,00%						
3)	Pengeranaan Pengendalian dan Pengeranaan Rencana Pertanian yang Terencana																									33,33%	40%					100,56%	100,00%
(1)	Jumlah Sarana yang Dikelola																									-	100,00%						



No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-							
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
(2)	Luas areal yang dianamaisasi						294,01 ha	286 ha	180 ha					-	104,4 ha					-	36,09%	
1	Jumlah Benihisasi AUIF						-	150 orang	150 orang					-	50 orang					-	33,33%	
2	Jumlah Petani AUIF						-	285 ha	285 ha					-	104,4 ha					-	36,55%	
3	Jumlah Pengumpulan Papan Basah Alam Siding Tanaman Pangan, Hasiluliran, Perekamian dan Keragaman Hayati						-	12 laporan	12 laporan					-	12 laporan					-	100,00%	
11	Tingkat Kesehatan						9,92%	9,79%	9,68%													
	Indeks Gizi						0,389	0,306	0,307													
8	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Peternak Rantau						10%	11,00%	13,00%					30,18%	30,18%						201,80%	193,18%
1)	Persentase Pemanahan Sensus Peternak						60%	66%	70%					76%	76%						126,00%	116,68%
(1)	Jumlah HK Michin yang Dihantar						6KK	2 KK	1 KK					6KK	2 KK						100,00%	100,00%
1	Jumlah Benih/Ekor Ternak yang Sumbahnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						5 KK	4 ekor	2 ekor					5KK	4 ekor						100,00%	100,00%
10	Pengaliran Pangan (Dapat Beli Masyarakat)						10,87%	10,92%	11,11%													
8	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani						30%	40%	50%					30,62%	40,00%						103,10%	100,00%
1)	Akses Inovasi Teknologi Pertanian						69%	67,80%	100,00%					69%	68,08%						100,00%	100,41%
(1)	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan						20 kelompok	20 kelompok	19 kelompok					21 kelompok	20 kelompok						105,00%	100,00%
1	Jumlah Peternak Pertanian Kelompok Tani						500 ek	550 ek	250 ek					500 ek	500 ek							
2	Jumlah PETAJAT Tani Tingkat Distrik						-	1 kali	1 kali					-	-							
3	Jumlah Field Day Kelas/Kelompok Tani						-	1 kali	1 kali					-	1 kali							
4	Jumlah Kelompok Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya						20 unit	20 unit	20 unit					20 unit	20 unit							

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
5	Jumlah Jenis Teknologi yang akan diadopsikan						1 jenis	2 jenis	2 jenis				2 jenis	1 jenis										
6	Jumlah Fasilitas Penerapan Pertanian Teknologi Tepat Sasar						-	1 kali	1 kali				-	-										
7	Jumlah Sarana dan Prasarana Peningkatan Pertanian						2 unit	2 unit	2 unit				2 unit	2 unit										
IV	Prevalensi Stunting						16,82%	16,81%	13,98%															
10	Shor Pola Pangan Beragam						88,8	88,78	88				88,7	87,8							100,23%	101,81%		
3)	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKG)						100%	100%	100%				100,00%	100,64%							100,00%	100,64%		
2)	Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)						100%	100%	100%				102,2%	110,00%							102,20%	110,00%		
(1)	Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi Penduduk						2400 kg/kd/Kapita/hari	2400 kg/kd/Kapita/hari	2400 kg/kd/Kapita/hari				2409 kg/kd/Kapita/ hari	2820,34 kg/kd/Kapita/ hari							100,00%	117,51%		
1	Jumlah Dokumen Haras Bekas Mikrosumi (HEM)						2 dokumen	-	-				2 dokumen	-							100,00%	-		
2	Jumlah Buku Haras Bekas Mikrosami (HEM)						-	10 buku	10 buku				-	5 buku							-	50,00%		
3	Jumlah Buku Analisis Harga Pangan						10 buku	10 buku	-				-	10 buku							-	100,00%		
4	Jumlah Tenaga Administrasi Sekretariat / Bidang/ Program / Kegiatan (Bidang Zetabekam Fungsional)						1 orang	1 orang	1 orang				1 orang	1 orang							100,00%	100,00%		
5	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bekas Mikrosami						2 laporan	2 laporan	2 laporan				2 laporan	2 laporan							100,00%	100,00%		
6	Jumlah Lomba Pemasokan Pakanternan						-	1 kali	-				-	-							-	-		
7	Jumlah Pemasokan Harga Pangan Pokok Kota Padang Panjang						-	350 kali	350 kali				-	365 kali							-	104,29%		
8	Jumlah Buku Analisis Harga Pangan						-	10 buku	10 buku				-	10 buku							-	100,00%		
9	Pemasokan Buku, Pacak dan Harga Pangan						-	1 dokumen	1 dokumen				-	1 dokumen							-	100,00%		
(2)	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah						-	3 ton	-				-	3 ton							-	100,00%		



No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-								
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Jumlah Laporan dan Dokumen Persetujuan yang Tersedia						14 laporan	-	-				14 laporan	-	-					100,00%	-	-	
1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD						14 laporan	-	-				14 laporan	-	-					100,00%	-	-	
2	Persentase Layanan Responsif Perangkat Daerah						90%	90%	90%				100%	100%						111,11%	111,11%		
1	Jumlah Orang yang Menikmati Opsi dan Tunjangan ASN						58 orang/ bulan	58 orang/ bulan	58 orang/ bulan				58 orang/ bulan	58 orang/ bulan						100,00%	100,00%		
2	Jumlah Laporan Keuangan Amda Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Amda Tahun SKPD						1 laporan	1 laporan	1 laporan				1 laporan	1 laporan						100,00%	100,00%		
3	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						14 laporan	14 laporan	14 laporan				14 laporan	14 laporan						100,00%	100,00%		
4	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen						100,00%	100,00%		
3	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan						90%	90%	90%				100%	90,00%						111,11%	100,00%		
1	Jumlah Paket Kegiatan Instansi Liris/ Peningkatan Efisiensi Kerja yang Disediakan						21 paket	21 paket	21 paket				21 paket	21 paket						105,62%	100,00%		
2	Jumlah Bulan Pembekalan Penyediaan Bauran Sampurna						3 bulan	-	-				3 bulan	-	-					100,00%	-	-	

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsai OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-							
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Jumlah Alat Kebersihan						47 jenis	-	-				47 jenis	-	-			100,00%	-			
6	Jumlah Jenis Alat Kantor yang Disediakan						74 jenis	-	-				74 jenis	-	-			100,00%	-			
7	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang Disediakan						-	7 jenis	7 jenis				-	7 jenis				-	100,00%			
8	Jumlah Paket Sistem Legistik Kantor yang Disediakan						7 paket	7 paket	7 paket				7 paket	7 paket				100,00%	100,00%			
9	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan						3 paket	3 paket	3 paket				3 paket	3 paket				100,00%	100,00%			
10	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dikuti						228 kali	196 kali	180 kali				229 kali	281 kali				100,00%	143,37%			
11	Jumlah Makan dan Minum Rapat yang Disediakan						706 kali	466 kali	500 kali				705 kali	508 kali				100,00%	108,58%			
12	Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						229 laporan	196 laporan	150 laporan				229 laporan	281 laporan				100,00%	143,37%			
4)	Persentase Pemanfaatan Ruang dan Pemanasan Aparatur						100%	100%	100%				-	100%				-	100,00%			
13	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						-	4 unit	15 unit				-	4 unit				-	100,00%			
5)	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah						90%	90%	90%				90%	100%				100,00%	111,11%			
14	Jumlah Jasa Jasa Buat Masyarakat yang Disediakan						-	3 jenis	3 jenis				-	3 jenis				-	100,00%			
15	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Buat Masyarakat						-	3 laporan	3 laporan				-	3 laporan				-	100,00%			
16	Jumlah Kegiatan Relisasi yang Dibayarkan						3 jenis	3 jenis	3 jenis				3 jenis	3 jenis				100,00%	100,00%			
17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Bomber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						3 laporan	3 laporan	3 laporan				3 laporan	3 laporan				100,00%	100,00%			
18	Jumlah Tenaga Keriah Lapangan yang Dibayarkan						25 orang	17 orang	15 orang				25 orang	17 orang				100,00%	100,00%			

No	Indikator Kinerja asasni Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target DKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-									
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
6	Jumlah Laporan Penyusunan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dibutuhkan						25 laporan	17 laporan	17 laporan				25 laporan	17 laporan							100,00%	100,00%		
4)	Persentase Capaian Pembayaran Bunga Milik Daerah								90%	90%	90%				100%	100%						111,11%	111,11%	
1	Jumlah Kendaraan Peranginan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibersihkan Pejalang								61 unit	61 unit	61 unit				61 unit	61 unit						100,00%	100,00%	
2	Jumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa								7 unit	7 unit	7 unit				6 unit	7 unit						85,71%	100,00%	
5	Jumlah Ombudsman Kantor dan Anggaran Lainnya yang Diperiksa/Dirubah kembali								2 unit	7 unit	7 unit				3 unit	7 unit						100,00%	100,00%	
4	Jumlah Sertifikat Tanah yang Tersedia								-	2 sertifikat	2				-	2 sertifikat						-	100,00%	
5	Luas Tanah yang Dibersihkan Pembayaran Bahala Itani								-	2 ha	2				-	2 ha						-	100,00%	

Sumber Data: Data Fungsi dan Peranan Kota Padang Panjang Tahun 2022

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada table 2.7 (Perubahan Renstra 2018-2023) tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skor Pola Pangan Harapan

Indikator pertama dari table 2.7 diatas adalah Skor Pola Pangan Harapan dengan indeks realisasi capaian sebelum renstra perubahan 2018-2023, pada tahun 2019 adalah 80,20, tahun 2020 adalah 85,60. Setelah renstra perubahan 2018-2023 Skor PPH berada pada tujuan prevalensi stunting dengan capaian pada tahun 2021 adalah 85,7 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 87,3 (indeks). Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target indikator kinerja skor PPH yaitu antara lain terlaksananya sosialisasi yang bertahap dan berkesinambungan bagi masyarakat untuk mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

2. Produksi Susu Sapi

Realisasi capaian produksi susu sapi pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : 396.720 liter/tahun, tahun 2020 : 326.206 liter/tahun. Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 sebesar 298.902 liter/tahun. Untuk tahun 2022 indikator produksi susu sapi berubah menjadi produktivitas susu sapi, dengan realisasi capaian pada tahun 2022 tersebut sebesar 11,67 liter/ekor/hari.

Salah satu faktor pendorong keberhasilan indikator Produksi Susu Sapi dan Produktivitas susu sapi ini adalah adanya peningkatan penerapan teknologi budidaya ternak sapi perah sehingga meningkatkan produktivitas sapi perah.

3. Pendapatan Pembudidaya Ikan

Realisasi capaian pendapatan pembudidaya ikan pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : 20.187.640 rupiah/tahun/RTP, tahun 2020 : 18.580.002 rupiah/tahun/RTP, Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 20.098.575 rupiah/tahun/RTP. Untuk tahun 2022 indikator pendapatan pembudidaya ikan berubah menjadi Angka Konsumsi Ikan (AKI), dengan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 41,82 kg/orang/tahun.

Faktor pendorong keberhasilan indikator pendapatan pembudidaya ikan dan Angka Konsumsi Ikan (AKI) ini adalah sosialisasi gemar makan ikan dan lomba masak serba ikan tingkat Kota Padang Panjang yang dapat mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan berupa ikan air tawar maupun ikan air laut. Selain itu adanya penyuluhan dan pembinaan yang optimal terhadap RTP (Rumah Tangga Perikanan) untuk mendukung pencapaian produksi perikanan budidaya di Kota Padang Panjang.

4. Produksi Padi

Realisasi capaian produksi padi pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : 9.810,6 ton, tahun 2020 : 8.557 ton, Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 10.058,3 ton. Untuk tahun 2022 indikator produksi padi berubah menjadi produktivitas padi, dengan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 8,04 ton/ha dari target sebesar 6,3 ton/ha sehingga capaiannya adalah 127,62%. Realisasi yang melebihi target ini merupakan hasil dari usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas padi di Kota Padang panjang.

5. Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias

Realisasi capaian persentase terbentuknya klaster tanaman hias pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : 5%, tahun 2020 : 5%, Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 50% dan tahun 2022 adalah 100%. Adapun target indikator persentase terbentuknya klaster tanaman hias pada tahun 2022 adalah 100% sehingga capaiannya adalah 100%, dimana progres pembentukan klaster tanaman hias sudah mencapai tahapan ditetapkannya Kota Padang Panjang sebagai kawasan tanaman hias melalui SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-757-2021 tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

6. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos

Realisasi capaian persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : N/A, tahun 2020 : 10%, Sedangkan pada



renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 20,15% dan tahun 2022 adalah 20,15%. Adapun Target persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos pada tahun 2022 adalah 11% sehingga capaiannya adalah 183,18%. Faktor pendorong pencapaian sasaran adalah meningkatnya nilai tambah dari ternak bantuan Bansos tersebut. Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petani sehingga permasalahan yang ditemui di lapangan dapat segera ditindak, seperti pengobatan terhadap ternak yang diserahkan.

7. Persentase Peningkatan Pendapatan Petani

Realisasi capaian persentase peningkatan pendapatan petani pada renstra sebelum perubahan 2018-2023 adalah : tahun 2019 : 10%, tahun 2020 : 24%, Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 30,63% dan tahun 2022 adalah 40%. Adapun Target Target persentase peningkatan pendapatan petani pada tahun 2022 adalah 40% dengan realisasi 40% sehingga capaiannya adalah 100%. Hal ini berarti bahwa petani telah mampu meningkatkan produksinya dan menekan biaya produksi melalui penerapan teknologi pertanian.

Definisi operasional cara pengukuran indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada 6 macam untuk tahun 2017-2018 dan 7 macam untuk tahun 2019-2023, yaitu:

1. Cara pengukuran indikator skor pola pangan harapan adalah
  - % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100;
  - Skor AKE = % AKE x Bobot;
  - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE; dan
  - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan.
2. Cara pengukuran persentase produksi benih perikanan adalah Jumlah produksi benih ikan (ekor) bagi target daerah (ekor) kali seratus persen.

3. Cara pengukuran persentase produksi ikan konsumsi adalah jumlah ikan konsumsi (ton) bagi target daerah (ton) kali seratus persen.
4. Cara pengukuran persentase produktivitas sektor pertanian adalah selisih produktivitas tahun lalu dengan tahun berjalan dibagi dengan produktivitas tahun lalu kali seratus persen.
5. Cara pengukuran peningkatan produksi rata-rata susu per tahun adalah jumlah produksi susu keseluruhan dalam satu tahun.
6. Cara pengukuran persentase kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian adalah Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Pertanian/ Perkebunan dibagi Jumlah PDRB kali seratus persen.
7. Cara pengukuran produksi susu sapi adalah jumlah produksi susu sapi/tahun
8. Cara pengukuran pendapatan pembudidaya ikan adalah jumlah produksi ikan dikali harga ikan dibagi jumlah RTP (Rumah Tangga Pembudidaya Ikan)
9. Cara pengukuran produksi padi adalah jumlah produksi padi per tahun
10. Cara pengukuran persentase terbentuknya klaster tanaman hias adalah progress tahapan pembentukan klaster tanaman hias, yaitu:
  - Tahap 1 (5%) = perencanaan
  - Tahap 2 (25%) = penyediaan sarana dan prasarana
  - Tahap 3 ( 50-75%) = lanjutan penyediaan sarana dan prasarana peningkatan SDM petugas dan petani
  - Tahap 4 (100%) = Terbentuknya klaster tanaman hias
11. Cara pengukuran meningkatnya pendapatan petani penerima bansos adalah pendapatan petani setelah diberi bantuan dibagi sebelum diberi bantuan dikali seratus persen.
12. Cara pengukuran meningkatnya pendapatan petani adalah persentase peningkatan pendapatan petani tanaman pangan (padi) /tahun/ha, dimana untuk mengukur pendapatan petani adalah dengan biaya penjualan hasil panen dikurang biaya produksi.

Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan merupakan salah satu lapangan usaha unggulan di Kota Padang Panjang yang layak dikembangkan lebih jauh. Lapangan Usaha ini pada dasarnya bukan menjadi penciri bagi sebuah kota dengan luas lahan yang sangat terbatas. Namun Kota Padang

Panjang memiliki lahan yang subur dan berada pada iklim yang sejuk sehingga bagaimanapun sektor ini tetap pantas dipertimbangkan. Kebutuhan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan Lapangan Usaha ini adalah :

- Intensifikasi pertanian, peternakan dan perikanan wilayah secara konsisten.
- Membatasi dan menetapkan aturan untuk melarang konversi lahan pertanian menjadi kebutuhan lahan non pertanian lainnya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Meningkatkan nilai tukar petani dan peternak terhadap produk masing-masing agar tetap berusaha di sektor bersangkutan.

Selanjutnya, Dinas Pangan dan Pertanian terdiri dari 1(satu) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang pangan dan 2 (dua) urusan pilihan yaitu urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan urusan pemerintahan bidang pertanian.

### **2.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**

Pangan adalah kebutuhan hak asasi manusia dimana pemenuhan kebutuhannya bagi setiap individu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (UU Pangan No. 18 Tahun 2014).

Pembangunan Ketahanan Pangan memiliki peran yang strategis pembangunan Kota Padang Panjang karena (1) akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak paling mendasar bagi manusia; (2) kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas; dan (3) ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan nasional yang berkelanjutan. Pemerintah daerah wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan. Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai, melalui 4 pilar yaitu

Ketersediaan pangan (produksi dan import), Cadangan pangan, Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan Pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan. Terkait pembangunan ketahanan pangan Kota Padang Panjang sudah melakukan berbagai upaya.

### 1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak stabilan ekonomi. Untuk memenuhi ketersediaan Pangan dan konsumsi penduduk agar mencukupi maka dilaksanakan penyusunan Neraca Bahan Makanan. NBM menyajikan jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk perkapita, baik dalam satuan kg/tahun maupun dalam satuan gram/hari, dalam satuan kg/kapita/tahun. Selain hal tersebut, NBM juga menyajikan jumlah pangan yang tersedia dalam bentuk zat gizi tertentu yaitu energi (kkal/hari), protein (gram/hari) dan lemak (gram/hari).

**Tabel 2.8**  
**Ketersediaan Energi dan Ketersediaan Proteintahun 2018-2022**

No.	Tahun	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)
1.	2018	2.812,12	78,93
2.	2019	2.695,53	74,31
3.	2020	2.855,36	78,56
4.	2021	2.486,84	50,52
5.	2022	2.820,34	73,65

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

### 2. Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok yaitu berupa beras atau non beras yang digunakan untuk menangani atau mengatasi masalah keadaan darurat (transien) dan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam dan gagal panen. Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan.
- b. Kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah maka Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang adalah sebanyak 23 (Dua puluh tiga) Ton. Adapun Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sampai ini sebanyak 3.000 (*Tiga ribu*) Kg atau 3 (*Tiga*) Ton.

**Tabel. 2.9**  
**Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang**

No	Tahun	Cadangan Pangan
1	2018	-
2	2019	-
3	2020	-
4	2021	-
5	2022	3.000 Kg

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

### 3. Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Tingkat Konsumsi Pangan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari Skor PPH yang merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk mencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. Untuk Tahun 2022 Skor PPH Kota Padang Panjang sebesar 87,3 terjadi peningkatan dibandingkan Skor PPH Kota Padang Panjang Tahun 2021 sebesar 85,7. Skor PPH Kota Padang Panjang ini masih dibawah target ideal Skor PPH yaitu 100, sehingga kedepan dibutuhkan upaya dan langkah yang tepat untuk merubah pola pikir masyarakat agar ikut dan mampu melaksanakan program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan mau menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

**Tabel 2.10**  
**Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Padang Panjang**

No	Tahun	Skor PPH
1	2018	85
2	2019	80,2
3	2020	85,6
4	2021	85,7
5	2022	87,3

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Keamanan pangan juga merupakan salah satu yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Untuk pengawasan keamanan pangan ini Kota Padang Panjang melakukan pengujian sampel pangan segar yang beredar dimasyarakat agar aman untuk dikonsumsi

**Tabel 2.11**  
**Pengujian Sampel Pangan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Aman	Jumlah Sampel Tidak Aman	Sampel Aman (%)
1	2018	21	19	2	90,47
2	2019	16	13	3	81,25
3	2020	-	-	-	-
4	2021	9	9	-	100
5	2022	7	6	1	85,71

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

#### 4. Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

**Tabel. 2.12**  
**Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Tahun 2022**

NO	Nama Kelurahan	Keterangan
1	Sigando	Rentan
2	Koto Panjang	Agak Rentan
3	Ganting	Agak Rentan
4	Koto Katik	Agak Rentan
5	Ngalau	Agak Rentan
6	Ekor Lubuk	Agak Rentan
7	Silaing Bawah	Agak Tahan
8	Kampung Manggis	Agak Tahan
9	Tanah Hitam	Agak Tahan
10	Balai-Balai	Tahan
11	Pasar Usang	Tahan
12	Guguak Malintang	Tahan
13	Tanah Pak Lambik	Tahan
14	Bukit Surungan	Sangat tahan
15	Silaing Atas	Sangat tahan

Sumber : Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Kota Padang Panjang tidak ada daerah yang mengalami rawan Pangan yang ada rentan pangan di satu kelurahan yaitu sigando, sesuai dengan Peta Kerawanan dan kerentanan Pangan yang telah di buat. Berikut adalah gambaran kondisi Kota Padang Panjang dari Rentan pangan sampai aman.

### 2.3.2. Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Dengan luas wilayah sebesar 23 km<sup>2</sup>, Kota Padang Panjang memiliki potensi pengembangan kawasan perikanan yang cukup besar yang didukung dengan kondisi geografis maupun struktur wilayahnya. Pengembangan kawasan perikanan dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi perikanan yang ada di Kota Padang Panjang guna menunjang target produksi perikanan. Perkembangan produksi perikanan di Kota Padang Panjang dilihat dari peningkatan produksi budidaya perikanan konsumsi, peningkatan produksi benih, dan peningkatan penangkapan ikan di perairan umum.

Pada umumnya kegiatan perikanan lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini walaupun produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi untuk pemenuhan kebutuhan Kota Padang Panjang sebagian besar masih didatangkan dari daerah lain, karena produksi yang ada belum mencukupi untuk kebutuhan dalam daerah. Dengan angka konsumsi ikan per kapita sebesar 41,82 kg, maka kebutuhan ikan konsumsi adalah 2.041 ton, sementara produksi baru mencapai 735,5 ton dengan jumlah penduduk kurang lebih 50.000 jiwa.

Aktivitas budidaya perikanan darat dilaksanakan melalui budidaya kolam air tenang, budidaya kolam air deras, budidaya ikan di kolam terpal dan perairan umum. Jenis ikan yang banyak dibudidayakan antara lain nila, lele, dan mas.

Dalam upaya peningkatan kegiatan budidaya untuk peningkatan produksi sudah diiringi dengan penyediaan benih unggul yang dihasilkan oleh UPTD BBI dan UPR serta pakan ikan yang murah. Jaminan pasar melalui kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di bawah bimbingan penyuluh perikanan dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Secara lebih lengkap perkembangan populasi produksi dan kegiatan perikanan dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2.13**  
**Perkembangan Populasi, Produksi dan Kegiatan Perikanan**  
**Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	<b>Produksi benih ikan</b>					
	Luas kolam (ha)	2,0	2,0	4,0	2,0	3,5
	Produksi (ribu ekor)	90.530	633.528	634.025	635.310	638.100
2.	<b>Produksi Pembudidayaan ikan rakyat (ikan konsumsi)</b>					
	Luas kolam (ha)	9,87	9,87	9,98	9,98	11,04
	Produksi (ribu ekor)	610,52	716,66	647,95	705,46	735,50
3.	<b>Produksi ikan di perairan umum</b>					
	Luas kolam (ha)	15,05	15,05	15,05	15,05	15,05
4.	Produksi (ribu ekor)	9,48	22,00	35,71	20,40	8,1

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023.



**Tabel 2.14**  
**Jumlah Produksi Perikanan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Produksi Perikanan (ton)	610,52	716,66	647,95	705,46	735,5
2.	Produksi olahan perikanan (ton)	0,98	1,1	0,4	0,5	0,6
3.	Benih perikanan (ribu ekor)	683.000	633.528	634.025	635.310	638.100

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga perikanan pembudidaya/ pengolahan tidak mengalami kenaikan, dengan luas lahan pembenihan adalah 3,5 Ha dengan produksi tahun 2022 sebanyak 638.100 ekor.

Dengan adanya UPTD BBI di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang maka diharapkan dapat meningkatkan produksi benih ikan unggul terutama benih ikan nila untuk kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang.

Produksi perikanan terutama ikan konsumsi mengalami kenaikan dari 705,46 ton menjadi 735,5 ton dengan produksi benih sebanyak 638.100 ekor yang dihasilkan dari UPTD BBI dan UPR di Kota Padang Panjang.

Di samping produksi perikanan dari perairan umum mengalami penurunan karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan listrik yang mengakibatkan benih dan induk ikan mengalami kematian. Pada tahun 2021 telah dilakukan usaha konservasi dengan melakukan penebaran benih ikan garing di perairan umum di Kota Padang Panjang dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan di perairan umum.

Untuk itu dalam pengawasan perairan umum dilakuan kerjasama seluruh masyarakat dalam mencegah terjadinya penggunaan alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan sehingga jumlah produksi dapat terjaga.

### **2.3.3. Urusan Pilihan Bidang Pertanian**

#### **1. Produktivitas pertanian**

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor – faktor produksi antara lain : lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan perlu untuk mempertahankan lahan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian. Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata alih fungsi lahan sawah pertahun di Indonesia mencapai 150 ribu sampai 200 ribu hektar. Mengantisipasi hal tersebut Pemerintah telah melaksanakan upaya pencegahan alih fungsi lahan dengan menetapkan UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menindaklanjuti UU No. 41 Tahun 2009 tersebut, Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luasan 147,05 Hektar yang tersebar di 4 (empat) kelurahan. Secara keseluruhan total luas lahan sawah eksisting di Padang Panjang adalah seluas 552 hektar.

**Tabel 2.15**  
**Produksi Komoditas Pertanian Kota Padang Panjang**  
**Tahun 2018 – 2022 (ton dan ton/ha)**

No	Komoditas	2018		2019		2020		2021		2022	
		Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas	Produksi	Produktivitas
1.	Produksi Padi	7.816,7	4,6	8.690,7	5,5	8.554,6	5,8	8.628,6	6,3	10.468,0	8,0
2.	Produksi Jagung	329,7	7,6	162,7	7,5	179,2	7,5	186,5	7,7	157,5	8,8
3.	Produksi Cabe	1.711,60	9,80	1.488,40	9,54	930,50	12,50	693,47	9,35	708,14	10,61
4.	Produksi Terung	1.488,10	24,02	1.643,10	21,62	1.341,50	18,65	1.024,10	18,41	1.394,00	22,05
5.	Produksi Kakao	8,28	0,80	3,10	0,65	3,40	0,70	2,96	0,74	2,94	0,77

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan produksi padi pada Tahun 2022 yang disebabkan oleh adanya peningkatan produktivitas padi dibanding tahun sebelumnya. Adapun faktor yang mendorong peningkatan produktivitas ini adalah penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pemakaian pupuk berimbang, pengendalian hama dan penyakit tumbuhan dan perbaikan sistem pengairan (irigasi). Namun demikian, diperlukan upaya yang berkesinambungan agar produksi dan produktivitas padi ini tetap terjaga dan bahkan ditingkatkan melalui intensifikasi pertanian. Komoditi jagung juga mengalami penurunan produksi sebagai akibat turunnya luas panen, namun secara produktivitasnya meningkat melalui penerapan pemupukan berimbang. Untuk komoditi lainnya seperti cabai, yang merupakan salah satu komoditi penyumbang inflasi khususnya di Sumatera Barat, produksinya mengalami

fluktuasi bahkan cenderung menurun. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya biaya produksi terutama biaya pupuk dan pestisida. Terjadinya alih komoditi yang ditanam petani ke komoditi bawang merah yang mulai marak ditanam oleh petani 2 tahun terakhir ini juga menjadi satu faktor penyebab turunnya produksi cabai.

Keterbatasan lahan di Padang Panjang menjadi salah satu alasan fokus pengembangan pertanian pada komoditi yang bernilai ekonomis tinggi seperti pertanian organik, tanaman hias dan komoditi lainnya yang menguntungkan bagi petani. Hal ini seiring dengan ditetapkannya Padang Panjang sebagai Kawasan Tanaman Hias di Sumatera Barat oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-757-2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk pertanian organik, saat ini sudah ada 2 kelompok tani yang memproduksi padi organik yang telah bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) Sumatera Barat, dan diharapkan dapat kita pertahankan dan bahkan dikembangkan lagi di kelompok tani lainnya.

## **2. Pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan**

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas di sektor pertanian dan perikanan, Pemerintah Kota Padang Panjang telah memfasilitasi kelompok masyarakat petani, peternak dan pembudidaya serta pengolah hasil perikanan dengan berbagai macam teknologi anjuran seperti pemakaian bibit unggul, pupuk berimbang, pengolahan tanah yang baik, pemberantasan hama penyakit, serta pengolahan pasca panen dan pemasaran untuk di sektor pertanian, untuk sector perikanan teknologi budidaya ikan yang baik serta pengolahan hasil perikanan tambah dengan pemakaian berbagai alsintan, jajar legowo 4:1 serta jajar legowo 2:1 yang disampaikan oleh penyuluh pertanian, penyuluh perikanan dalam bentuk kegiatan demplot dan kaji terap.

**Tabel 2.16**  
**Jumlah Teknologi Anjuran yang Telah Diterapkan Tahun 2018-2022**

No	Sub Sektor	Jumlah Teknologi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tanaman Pangan	1	-	-	-	-
2.	Hortikultura	12	-	2	1	1
3.	Perkebunan	-	-	-	-	-
4.	Peternakan	-	-	-	-	-
5.	Perikanan	-	-	-	-	1

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2023

Untuk sektor perikanan dari tahun 2018-2022 ada 3 teknologi yang telah disampaikan kepada kelompok pembudidaya ikan dalam bentuk kegiatan kaji terap serta demplot disamping teknologi lainnya yang disampaikan oleh Penyuluh Perikanan. Selain itu disektor hortikultura dari tahun 2018-2022 sebanyak 32 paket teknologi yang telah disampaikan kepada kelompok tani melalui Penyuluh Pertanian dan kegiatannya berupa demplot serta kaji terap.

### 3. Pelaku Sektor Pertanian dan Perikanan

Di Kota Padang Panjang alih fungsi lahan setiap tahun selalu terjadi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian seperti perumahan. Namun minat masyarakat terhadap pertanian masih cukup tinggi. Ini ditandai dengan jumlah kelompok usaha yang mengelola sektor pertanian dan perikanan setiap tahunnya selalu bertambah.

**Tabel 2.17**  
**Perkembangan Kelompok Usaha Pertanian Tahun 2018-2022**

No	Jenis usaha/ Komoditi	Kelompok Yang Mengusahakan				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Padi	47	48	49	49	49
2	Palawija	-	-	-	-	-
3.	Hortikultura					
	- Sayuran	39	41	41	44	49
	- Buah-buahan	-	-	-	-	-
	- Tanaman Hias	30	30	30	30	30
4	Peternakan					
	- Ternak besar	11	11	11	10	11
	- Unggas	-	-	-	2	2
5	Perikanan	30	35	39	41	41
6	Poklhasar	1	1	2	3	4

No	Jenis usaha/ Komoditi	Kelompok Yang Mengusahakan				
		2018	2019	2020	2021	2022
7	UP3HP	1	1	1	1	1
8	Perkebunan	3	3	3	3	3

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel di atas kelompok usaha pertanian komoditi padi tahun 2022 adalah 49 kelompok hanya mengalami kenaikan sebanyak 2 kelompok saja sejak tahun 2018 karena alih fungsi lahan. Sedangkan yang mengalami kenaikan adalah kelompok usaha sayuran dari 39 kelompok pada tahun 2018 menjadi 49 kelompok pada tahun 2022 yang difokuskan dilahan pekarangan.

Untuk kelompok usaha peternakan didominasi oleh usaha peternakan sapi perah dan sapi potong yang berjumlah 11 kelompok dan 2 kelompok yang mengusahakan unggas seperti ayam dan itik. Sedangkan kelompok usaha perikanan didominasi oleh kelompok pembudidaya perikanan sebanyak 41 kelompok dan kelompok usaha pengolahan perikanan sebanyak 4 kelompok.

Unit Pelayanan Pengembangan dan Pengolahan Hasil Pertanian (UP3HP) terdapat 1 kelompok dan kelompok usaha perkebunan sebanyak 3 kelompok yang tidak mengalami kenaikan seperti kelompok usaha lainnya.

Pemerintah Kota Padang Panjang berupaya untuk terus melakukan pembinaan dan pengembangan usaha pada masing-masing kelompok agar kelompok-kelompok tersebut terus aktif dan dapat mengembangkan usahanya masing masing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan anggota kelompok.

**Tabel 2.18**  
**Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tahun 2018-2022**

No	Sektor	Tenaga Kerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Tanaman pangan	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
2	Hortikultura	782	830	929	1.003	1.106
3	Perkebunan	73	73	73	73	73
4	Peternakan	125	125	133	133	152

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian, 2023

Dari tabel di atas yang mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja adalah yang menggeluti sektor hortikultura dan peternakan karena pemeliharannya dan teknologi yang sederhanasera dengan waktu yang singkat dan harga yang

cukup tinggi sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengusahaan di sektor ini.

Sementara itu untuk sektor tanaman pangan dan perkebunan jumlah tenaga kerja tidak mengalami kenaikan karena lahan masing-masing anggota kelompok terbatas sehingga hasil yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri.

#### **4. Produktifitas Peternakan**

Kota Padang Panjang merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan ternak Sapi Perah dari kementerian Pertanian diluar pulau jawa dan berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Barat. Sehingga potensi yang menjadi unggulan daerah dibidang peternakan yaitu Sapi Perah. Tidak hanya Sapi Perahnya saja namun juga semua ikutan dari hasil Sapi Perah menjadi potensi pendapatan bagi Peternak dan Unit Pengolahan Susu di Kota Padang Panjang.

Selain Sapi Perah Kota Padang Panjang telah memiliki brand tersendiri terkait Daging yang dihasilkan dari Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) Padang Panjang di mata masyarakat di Sumatera Barat khususnya dan Provinsi tetangga Umumnya, dimana daging Sapinya sangat terkenal enak dan diminati oleh masyarakat Sumatera Barat.

Sehingga Produksi Daging dan Susu Sapi Perah di Kota Padang Panjang menjadi perhatian oleh Pemerintah guna meningkatkan pendapatan Peternak dan yang bergerak di pengolahan serta pemasaran dua produk ini. Dari data 3 tahun belakangan ini, memang Populasi Ternak, produksi Susu dan Daging mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dikarenakan adanya wabah Corona dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak masyarakat.

Dari data Produksi dari tahun 2020, 2021 dan 2022 untuk ternak sapi (Sapi potong dan Sapi Perah) terlihat penurunan dengan populasi; 431 ekor, 417 dan 402 ekor. Sedangkan produksi daging Sapi ditahun 2020; 559.517 ton pertahun, untuk tahun 2021 sebanyak 715.431 ton pertahun, sementara untuk tahun 2022 hampir sama dengan tahun 2021.

Dalam hal pengendalian penyakit hewan menular maupun Zoonosis di Kota Padang Panjang, dari 3 tahun belakangan ini mampu ditekan dan seiring dengan itu adanya peningkatan dan semakin membaiknya kualitas kesehatan hewan ternak maupun hewan kesayangan di masyarakat Kota Padang Panjang.

Untuk Produk olahan dari Susu Murni sudah memiliki Izin Edar (MD) berupa produk susu Pasteurisasi varian rasa Coklat, Yougurt rasa srowbery, coklat. Telah memiliki 5 Izin Edar untuk produk susu Pasteurisasi dan Yougurt. Sehingga dengan adanya Izin Edar ini memberi peluang pemasaran lebih luas produk susu yang dihasilkan oleh Unit Pengolahan Susu di Kota Padang Panjang.

Adapun untuk melihat anggaran dan capaian realisasi pendanaan pada Dinas Pangan dan Pertanian selama kurun waktu 2019-2023 dapat digambarkan pada tabel 2.19 berikut ini :

Tabel 2.19  
 Anggaran dan Realisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Berkas Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rasio Data Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	23	23	
1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	23	
<b>BERSIUK PERUBAHAN</b>																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.858.039.400	2.006.279.890				2.033.869.781	1.829.882.889				84,09	91,08	0	0	903.483.810	812.644.483	
Rogiatan Penyelenggaraan Jasa Sura-berlayar	4.900.000					4.423.000					89,23	0,00	0	0	900.000	888.000	
Rogiatan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.433.000					128.278.944					70,37	0,00	0	0	28.684.000	27.278.289	
Rogiatan Penyelenggaraan Jasa Rogiatan Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Dinas / Operasional	243.138.900	290.297.700				308.880.931	205.571.913				87,63	78,22	0	0	187.088.930	134.948.547	
Rogiatan Penyelenggaraan Jasa Bobrokkan Kantor	623.834.000	232.348.000				578.062.577	238.783.518				92,84	98,34	0	0	170.214.000	181.989.879	
Rogiatan Penyelenggaraan Jasa Kantor	43.900.000					43.265.490					98,56		0	0	8.700.000	8.682.090	
Rogiatan Penyelenggaraan Barang Cetak dan Pengabdian	48.578.800	48.700.000				33.717.800	45.721.250				70,27	93,78	0	0	14.069.900	15.689.710	
Rogiatan Penyelenggaraan Koneksi (Instansi Lain) / Pemasangan Bangunan Kantor	13.900.000	134.800.000				16.487.900	129.418.987				90,79	82,68	0	0	24.030.000	28.978.811	
Rogiatan Penyelenggaraan Makanan dan Minuman	87.200.000	18.230.000				47.890.800	18.128.210				71,27	94,18	0	0	17.290.000	13.303.140	
Rogiatan Rapi-Rapi Koordinasi dan Kemudahan ke Luar Daerah	485.728.000	140.000.000				424.042.968	121.888.090				89,28	94,03	0	0	128.130.980	112.143.838	
Rogiatan Penyelenggaraan Jasa Tenaga Administrasi / Tolak Penerimaan	848.904.000	1.023.578.200				974.698.231	970.384.412				98,97	94,38	0	0	334.348.040	308.990.338	
Program Peningkatan Sikap dan Perilaku Aparatur	152.834.000	92.140.000				116.910.000	87.964.000				76,48	94,44	0	0	49.214.800	40.978.800	
Rogiatan Penyelenggaraan Rutin / Bina-ruah Gedung Kantor	25.000.000	21.140.000				28.038.080	36.030.000				99,54	82,39	0	0	28.038.000	32.217.810	
Rogiatan Penyelenggaraan Rutin / Bina-ruah Peralatan Gedung Kantor	82.824.000					30.482.780					87,61	0,00	0	0	10.888.800	8.086.780	
Rogiatan Penyelenggaraan Tanah Pemukiman Daerah	3.000.000					1.286.300					87,83	0,00	0	0	1.000.000	873.240	
Rogiatan Peningkatan Gedung / Bina-ruah Gedung Kantor		82.000.000					81.924.000				0,00	98,89	0	0	12.400.000	12.288.800	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000					42.888.000					85,74	0,00	0	0	10.000.000	8.574.800	
Rogiatan Peningkatan Tolak (Injeksi) Perawatan Perawatan Lapangan	30.000.000					42.888.000					85,74	0,00	0	0	10.000.000	8.574.800	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	792.800					719.000					89,99	0,00	0	0	159.980	143.800	
Rogiatan Penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Realisasi Kinerja SPK	499.900					487.000					97,42	0,00	0	0	98.980	93.400	
Rogiatan Penyelenggaraan Pelaporan Keuangan Jujur Tahun	292.900					232.000					84,32	0,00	0	0	59.980	50.400	





URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rasio Data Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	19	20	21	22	22	23	
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Rogatan Pengembangan Teknologi Hasil Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah		2.200.000					2.154.900				0,00	93,45	0	0		560.000	550.900
Rogatan Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/Perkebunan		(13.000.000)					(13.240.550)				1,00	99,55	0	0		24.000.000	24.958.110
Rogatan Peningkatan Pemetaan Pertanian Teknologi Tepat Guna		2.000.000					2.000.000				0,00	100,00	0	0		600.000	600.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Berusaha Perikanan		7.598.850					7.598.800				0,00	100,00	0	0		1.819.770	1.819.770
Pendampingan Bioteknologi Kapada Masyarakat		7.598.850					7.598.800				0,00	100,00	0	0		1.819.770	1.819.770
Program Pencapaian dan Pengumpulan Sampel Murni	300.000.000	321.870.000				320.912.100	320.660.100				96,99	97,84	0	0		106.347.000	97.114.440
Rogatan Pemeliharaan Kesehatan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat	320.988.000	321.870.000				320.912.100	320.660.100				96,99	97,84	0	0		106.347.000	97.114.440
Program Peningkatan Hasil Produksi Perikanan	1.888.274.800	432.491.100				1.498.724.700	397.726.200				79,48	91,97	0	0		482.752.180	379.202.991
Rogatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat	812.008.000	292.426.000				671.889.450	282.882.150				82,81	96,78	0	0		222.288.900	204.948.721
Rogatan Pemeliharaan Bioteknologi Kapada Masyarakat	457.995.000					317.811.200					69,46	0,00	0	0		81.479.060	62.662.300
Rogatan Pengembangan Sistem Perikanan	69.750.000	2.000.000				64.206.750	2.028.750				92,18	96,24	0	0		14.238.100	13.248.700
Rogatan Sarana dan Prasarana Perikanan	546.290.000	77.066.100				444.877.000	43.282.250				81,42	86,14	0	0		124.821.220	97.847.870
<b>BETULAN PERUBAHAN</b>																	
Program Perunggang Usaha Perikanan Daerah (Koperasi/UKM)			9.129.202.859	8.824.928.558	8.182.114.571		8.269.725.729	8.242.237.644			0,00	0	91,5798	0		5.229.488.614	2.242.422.675
Rogatan Pemantauan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pengabdian Daerah			569.900								0	0	0	0		112.960	-
Sub Rogatan Kesehatan Penyuluhan dan Peningkatan Layanan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD			569.900								0	0	0	0		112.960	-
Rogatan Administrasi Keuangan Pengabdian Daerah			7.242.118.100	7.192.182.924	6.812.918.257		6.992.000.578	7.002.010.610			0	0	92,72	0		4.221.940.468	2.777.002.228
Sub Rogatan Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN			7.242.118.100	7.192.182.924	6.812.918.257		6.992.000.578	7.002.010.610			0	0	92,72	0		4.221.108.458	2.776.237.428
Sub Rogatan Kesehatan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD			1.064.900	494.950	-		789.800	221.230			0	0	71,23	0		211.950	218.970
Sub Rogatan Kesehatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD			578.000	690.900	-		192.800	782.160			0	0	32,33	0		215.790	194.800
Sub Rogatan Penyusunan Laporan dan Analisa Program Realisasi Anggaran			271.900	149.900	-		243.000	77.900			0	0	82,09	0		104.260	82.900

URAIAN	Anggaran Pokok Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rasio Data Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	20	23	
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Rogiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			306.826.474	349.288.493	336.408.800			323.901.873	282.280.338		-	0	0	72,51	0	309.800.904	26.179.242
Sub Rogiatan Penyediaan (Kumpulan Instalasi) Lemak/Pemasangan Bangunan Daerah			17.242.000	20.888.800	19.988.800			18.281.000	17.860.800		-	0	0	89,69	0	18.944.080	6.608.220
Sub Rogiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			138.884.274	119.882.830	130.698.000			88.738.000	88.429.940		-	0	0	87,87	0	72.749.174	24.462.810
Sub Rogiatan Penyediaan Barang Cokelat dan Pengemasan			28.836.790	22.611.700	18.644.790			14.768.800	12.923.790		-	0	0	43,40	0	18.576.640	8.129.860
Sub Rogiatan Penyelenggaraan Pagar Kesehatan dan Kesehatan SIPP			121.983.280	188.898.880	222.776.000			104.618.823	128.227.126		-	0	0	84,28	0	109.221.010	47.988.893
Rogiatan Pengadaan Barang (001) Diarahkan Pemungutan Utusan Pemerintah Daerah				27.448.000	-				28.538.000		-	0	0	0	0	7.488.000	7.108.000
Sub Rogiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				27.448.000	-				28.538.000		-	0	0	0	0	7.488.000	7.108.000
Rogiatan Penyediaan Jasa Pemungutan Utusan Pemerintah Daerah			996.474.824	771.817.024	782.430.224			771.848.810	583.831.490		-	0	0	86,08	0	474.140.588	273.030.661
Sub Rogiatan Penyediaan Jasa Busan Hilirisasi				4.000.000	4.000.000				2.100.000		-	0	0	0	0	1.800.000	600.000
Sub Rogiatan Penyediaan Jasa Kesehatan, Sumber Daya Air dan Listrik			208.824.024	300.818.224	281.785.754			123.820.042	112.487.078		-	0	0	80,78	0	121.002.208	45.272.484
Sub Rogiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			682.640.800	306.800.800	806.683.200			547.768.482	487.926.420		-	0	0	83,32	0	241.229.260	223.140.178
Rogiatan Pemeliharaan Barang (001) Daerah			592.302.592	572.248.000	421.283.760			492.827.987	488.949.200		-	0	0	82,24	0	317.282.872	192.111.423
Sub Rogiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan dan Pagar Kesehatan Pemungutan Utusan (atau Kesehatan Dinas, Jalanan			320.482.960	429.828.800	307.328.800			289.140.800	269.818.800		-	0	0	79,42	0	313.490.210	128.780.820
Sub Rogiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya			68.809.600	68.818.280	42.281.000			80.907.000	89.742.800		-	0	0	75,80	0	28.182.170	18.049.600
Sub Rogiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			124.000.000	70.800.000	71.743.960			182.910.267	88.799.200		-	0	0	94,21	0	87.249.182	48.143.712
Sub Rogiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah				8.800.000	-				800.000		-	0	0	0,00	0	1.260.000	180.000
Program Peningkatan Diversifikasi dan Stabilisasi Pangan Masyarakat			40.781.800	467.208.200	124.788.200			28.288.998	288.179.441		-	0	0	93,57	0	114.319.220	83.288.888
Rogiatan Penyediaan dan Penyulutan Pangan Pokok atau Pangan lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah (Kot/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pangan dan harga pangan)				27.188.800	28.648.800				25.189.213		-	0	0	0	0	12.168.240	7.227.242
Sub Rogiatan Penyediaan (Bantuan Harga Pangan dan /atau Bahan Makanan)				21.888.800	28.648.800				20.178.713		-	0	0	0	0	12.128.240	8.024.742
Pemantauan Dink/ Pemantauan dan Harga Pangan				5.200.000	-				5.010.500		-	0	0	0	0	1.040.000	1.002.100
Rogiatan Penyediaan dan Eksistensi Cadangan Pangan (Kategori) Kota				32.000.000	-				21.577.000		-	0	0	0	0	8.000.000	8.215.400

URAIAN	Anggaran Pokok Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rasio Data Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	20	23	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sub Kegiatan Pengabdian Masyarakat Dengan Pendekatan Komunitas (Kampung, Kota)				32.000.000	-				32.577.000	-	0	0	0	0	0.000.000	0.315.400	
Kegiatan Pelaksanaan Pemogatan Target Riset/ Pengabdian Masyarakat/ Tahun Kedua dengan Metode Penelitian Ilmiah				32.000.000	98.143.800				320.408.228	-	0	0	0	0	34.598.640	64.051.340	
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja/ Anggaran Per Tahun				3.320.000	-				3.328.260	-	0	0	0	0	665.000	605.330	
Sub Kegiatan Pembudayaan (kegiatan dalam Pengembangan Komunitas Pengabdian Masyarakat Sumbat Daya Lokal)				322.810.800	66.143.800				217.276.872	-	0	0	0	0	35.021.640	31.475.900	
Kegiatan Pelaksanaan Pemogatan Target Riset/ Pengabdian Masyarakat/ Tahun			43.751.600					38.160.999			0	0	33,37	0	8.198.320	7.653.200	
Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja/ Anggaran Per Tahun			3.320.000					4.390.820			0	0	94,25	0	1.040.000	978.100	
Sub Kegiatan Pembudayaan (kegiatan dalam Pengembangan Komunitas Pengabdian Masyarakat Sumbat Daya Lokal)			23.881.600					33.273.499			0	0	30,30	0	7.118.320	6.654.000	
Program Pengawasan Keamanan Pangan			10.554.880					10.454.700			0	0	99,05	0	2.110.926	2.090.940	
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Sederhana Daerah Kabupaten/ Kota			10.554.880					10.454.700			0	0	99,05	0	2.110.926	2.090.940	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Sederhana Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota			4.385.000					4.042.000			0	0	92,32	0	973.000	908.400	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Sederhana Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota			3.880.880					3.812.700			0	0	98,25	0	1.137.926	1.132.540	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			831.950.300	879.307.400	558.228.800			779.862.452	603.894.891	-	0	0	33,68	0	432.171.500	276.709.589	
Kegiatan Pengadaan Pribudidaya Ikan			831.950.300	879.307.400	558.228.800			779.862.452	603.894.891	-	0	0	33,68	0	432.171.500	276.709.589	
Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pribudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			842.980.300	879.307.400	558.228.800			782.249.232	633.894.891	-	0	0	33,44	0	413.271.500	281.406.829	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pribudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			89.000.000					78.214.300			0	0	88,97	0	17.899.000	18.302.940	
Program Pengalihan dan Pemantauan Hasil Perikanan			00.073.450	28.858.700	74.384.440			19.887.500	32.232.600	-	0	0	38,09	0	08.062.218	10.084.000	
Kegiatan Penelitian Tesis Dalam Bidang Perikanan Hasil Perikanan Bagi Warga Suku Iktic dan Koi			30.072.450	28.858.700	74.384.440			19.887.500	32.232.600	-	0	0	38,09	0	08.062.218	10.084.000	

URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rasio Data Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	20	23	
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Data Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian skala 1 (kaki) Daerah Kabupaten/ Kota			30.072.450	25.058.700	74.994.440			19.897.900	23.222.000		0	0	99,08	0		30.062.318	15.204.000
Program Pendidikan Pengembangan Sarana Pertanian			789.900.000	1.312.965.750	918.508.108			701.180.016	949.987.091		0	0	91,99	0		999.994.963	330.013.941
Rogiatan Penguasaan Penguasaan Sarana Pertanian			22.000.000	218.800.000	88.000.000			19.194.000	18.204.800		0	0	97,20	0		88.120.000	7.487.700
Sub Kegiatan Pendukung Penguasaan Sarana Produksi Pertanian			22.000.000	218.800.000	88.000.000			19.194.000	18.204.800		0	0	97,20	0		88.120.000	7.487.700
Rogiatan Penguasaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Sistem Organisme Komersial			282.067.950	492.742.000	106.818.900			254.019.289	294.200.178		0	0	90,05	0		178.805.880	128.805.812
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tumbuhan			78.971.200	492.742.000	106.818.900			70.978.288	294.200.178		0	0	92,73	0		128.028.200	83.887.112
Sub Kegiatan Pemantapan SDG Hewan/ Tumbuhan			217.496.750					184.744.200			0	0	94,94	0		42.496.200	38.948.800
Rogiatan Penguasaan Mutu dan Pembinaan Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota			450.822.000	514.928.200	292.798.000			427.177.527	448.981.818		0	0	94,82	0		351.851.800	178.181.828
Sub Kegiatan Penguasaan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Benih Pakan/ Pakan, Tanaman Siala/ Kacil			450.822.000	514.928.200	292.798.000			427.177.527	448.981.818		0	0	94,82	0		351.851.800	178.181.828
Rogiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya Sakam 1 (kaki) Daerah Kabupaten/ Kota				99.994.750	430.992.208				88.791.000		0	0	0,00	0		104.097.812	17.788.200
Pengadaan Benih/ Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota (termasuk Rogiatan)				99.994.750	430.992.208				88.791.000		0	0	0,00	0		104.097.812	17.788.200
Program Penyelidikan Pengembangan Prasarana Pertanian			150.700.000	282.781.900	280.296.900			145.204.557,30	282.998.228		0	0	96,55	0		142.773.720	81.708.537
Rogiatan Pengembangan Prasarana Pertanian				2.000.000					1.942.800		0	0	0,00	0		400.000	208.800
Sub Kegiatan Penguasaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCPB, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KPGB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCPCB				2.000.000					1.942.800		0	0	0,00	0		400.000	208.800
Rogiatan Pengembangan Prasarana Pertanian			136.700.000	272.818.900	280.296.900			123.266.857,30	280.240.728		0	0	99,08	0		127.822.720	79.247.487
Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemertanahan Lahan Usaha Pakan				10.000.000	128.000.000				9.824.000		0	0	0,00	0		28.000.000	1.968.000
Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemertanahan Lahan Usaha Pakan				125.000.000					124.055.044		0	0	0,00	0		27.000.000	28.811.029



URAIAN	Anggaran Pendapatan					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Data Data Perbandingan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	Anggaran	Realisasi
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	20	21
1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	23
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pertanian			12.118.000	26.755.400	48.000.000			10.925.000	27.421.400	-	0	0	90,18	0	10.750.000	8.871.400
<b>Jumlah</b>	<b>8.245.852.800</b>	<b>1.710.122.500</b>	<b>11.479.822.239</b>	<b>22.157.493.428</b>	<b>13.079.168.069</b>	<b>7.192.856.900</b>	<b>2.478.873.814</b>	<b>10.430.207.828,00</b>	<b>11.136.221.703,50</b>	<b>-</b>	<b>90,18</b>	<b>92,79</b>	<b>92,87</b>	<b>91,52</b>	<b>8.200.452.200</b>	<b>8.440.711.781</b>

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2020

Dari segi anggaran dan realisasi pendanaan, dari Tabel 2.19 tersebut diatas dapat dilihat bahwa kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian cukup berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari realisasi keuangan yang lebih dari 85%. Realisasi anggaran pada Tahun 2020 mencapai 93,79%, Tahun 2021 mencapai 90,87% dan pada Tahun 2022 sebesar 91,52%. Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan yang mempertimbangkan ketersediaan SDM pelaksana dan pengaturan jadwal pelaksanaan yang memperhitungkan kepadatan pekerjaan. Selain itu, ketersediaan juklak dan juknis yang jelas dari masing-masing sumber anggaran menjadi pedoman dalam mekanisme perencanaan dan pemanfaatan anggaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

### 2.4.1 Tantangan

Mengingat Dinas Pangan dan Pertanian menangani 1 (satu) urusan wajib non pelayanan dasar dan dua urusan pilihan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi, maka telaahan berikut ini juga mencakup renstra dua kementerian dan tiga OPD Provinsi yang berbeda. Beberapa arah kebijakan dari masing-masing urusan akan semakin memperkaya kemunculan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian :

1. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian;
2. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
3. Tingginya upah tenaga kerja, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain;
4. Rendahnya produktivitas komoditi pertanian;
5. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/ hewan;
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
7. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun;
8. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional;
9. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
10. Lemahnya kelembagaan tani;
11. Status kepemilikan lahan;
12. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat, dan
13. Belum Optimalnya Pasar yang menampung hasil produksi pertanian.

#### **2.4.2 Peluang**

1. Padang Panjang memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada daerah persimpangan;
2. Iklim yang mendukung dengan curah hujan 3.119,60 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 176 hari dalam setahun, sehingga komoditi pertanian dan perikanan dapat berkembang dengan baik;
3. Kondisi jalan dan akses transportasi lancar baik dari sentra produksi maupun ke pasar;
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Padang Panjang relatif besar terhadap total PDRB Kota Padang Panjang ( 5,15 %). (sumber PPDA tahun 2021);
5. Adanya dukungan inovasi teknologi oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak ketiga lainnya;
6. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian; dan
7. Ditetapkannya Kota Padang Panjang oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Barat sebagai kawasan sapi perah dan tanaman hias.

#### **2.5 Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yaitu :

- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
- b. Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- c. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- d. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
- e. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- f. Badan Urusan Logistik (BULOG)
- g. Kelompok Wanita Tani (KWT)
- h. Asosiasi Petani Tanaman Hias (APTH)
- i. Masyarakat pelaku usaha perikanan (pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan)
- j. Kelompok Tani serta stake holder lainnya yang terkait
- k. Distributor dan pengecer pupuk dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah

- l. Kejaksanaan dan kepolisian dalam rangka pengawasan peredaran pupuk dan pestisida sesuai dengan Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 28.2/Kpts/SR.340/B/05/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
- m. Badan Pertanahan Nasional dalam rangka koordinasi tentang lahan sawah
- n. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
- o. Balai Besar Pasca Panen Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- p. Komunitas hewan/satwa
- q. Fonterra Brands Indonesia
- r. Organisasi Persatuan Olahraga Berburu Babi (PORBBI)
- s. Mitra binaan pengolah hasil peternakan seperti : Rumah susu dan Serambi milk
- t. Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagaimana dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian, setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pangan dan Pertanian, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dengan rincian pada Tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**  
**Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) ideal	1. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat belum memenuhi kaidah B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman)	1. Keterbatasan kemampuan ekonomi 2. Keterbatasan kemampuan mengolah bahan pangan lokal yang diminati masyarakat sebagai pangan alternatif pengganti beras (substitusi)

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum</li> <li>4. Pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman</li> </ol>
2.	Menurunnya jumlah populasi ternak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya produksi susu sapi</li> <li>2. Menurunnya minat masyarakat untuk beternak karena tingginya biaya produksi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pemasaran dan pengolahan hasil produksi susu sapi</li> <li>2. Masih tingginya angka kematian ternak</li> <li>3. Belum optimalnya penerapan teknologi pasca panen peternakan</li> <li>4. Belum semua produk olahan susu memiliki izin edar</li> <li>5. Masih adanya indukan yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)</li> </ol>
3.	Rendahnya Pendapatan Petani Ikan pada Usaha Budidaya Ikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya produksi perikanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya Biaya Produksi pada Budidaya Ikan</li> <li>2. Rendahnya kualitas SDM Petani Ikan dalam Budidaya Ikan</li> <li>3. Belum Adanya Penghasil Pakan Ikan dengan Harga yang Terjangkau</li> </ol>
4.	Rendahnya Produksi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya Alih Fungsi Lahan Pertanian</li> <li>2. Rendahnya Produktivitas Pertanian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebutuhan Lahan untuk Pemukiman dan sarana lainnya</li> <li>2. Berkembangnya Hama Penyakit Tanaman</li> </ol>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3. Petani Kebanyakan Penggarap 4. Kurangnya SDM Petani yang Mengelola Kelembagaan 5. Belum diterapkannya budidaya tanaman sehat 6. Belum Optimalnya Penyuluh dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani
5.	Rendahnya pendapatan petani peternak	1. Masih tingginya angka kemiskinan peternak	1. Belum optimalnya SDM peternak 2. Tingginya biaya produksi 3. Sarana dan prasarana penunjang masih kurang

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2022

## 3.2. Telaahan Renstra Provinsi

### 3.2.1 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang disusun untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 (dua) tujuan yang terdiri dari:

1. Meningkatnya ketahanan pangan dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan;
2. Meningkatnya diversifikasi konsumsi masyarakat;
3. Meningkatnya keamanan pangan;
4. Meningkatnya stabilisasi harga pangan pokok dan strategis;
5. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani.

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas, maka strategi Dinas Pangan adalah:

1. Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok;

2. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal;
4. Pemberdayaan daerah rentan pangan;
5. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen; dan
6. Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau;

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pangan menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau;
2. Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis;
3. Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat;
4. Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;
5. Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal;
6. Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;
7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
8. Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
9. Pengawasan peredaran sarana pertanian;
10. Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan, dan
11. Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun (2021-2026) mendatang ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Visi :</b> Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
<b>Misi 3 :</b> Meningkatkan Nilai tambah dan produktifitas produk pertanian, perkebunan , peternakan dan perikanan			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
1 Meningkatkan Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat	1.1 Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1.1. Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat;	- Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
		1.2. Pemberdayaan daerah rentan pangan	- Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;
	1.2 Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2.1. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal;	- Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;
			- Pemberdayaan kelompok pengolahan pangan lokal



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	1.3 Meningkatnya Keamanan Pangan	3.1 Peningkatan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;</li> <li>- Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar di tingkat produsen dan konsumen</li> <li>- Pengawasan peredaran sarana pertanian</li> <li>- Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan</li> <li>- Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan</li> </ul>
	1.4 Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan strategis (Akses Pangan)	4.1 Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau.</li> <li>- Subsidi harga terhadap pangan pokok strategis</li> </ul>

Sumber : Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

### 3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

Untuk mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan pendapatan petani yang diturunkan ke dalam sasaran

meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura. Selain itu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga menetapkan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani dimana tujuan ini didukung oleh sasaran meningkatnya tata kelola organisasi.

Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan arah kebijakan antara lain :
  - a. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada
  - b. pelaku utama dalam berusaha tani
  - c. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
  - d. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
  - e. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
  - f. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta
  - g. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
  - h. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
  - i. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas
  - j. Pengawasan pupuk bersubsidi
  - k. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan
  - l. dan hortikultura
  - m. j. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku
  - n. utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada
  - o. k. Rehabilitasi Lahan dan Air
2. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan kebijakan:
  - a. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian;
  - b. Mendorong tumbuh petani milenial;
  - c. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian.
3. Pengembangan sistem Value Chain, dengan kebijakan :
  - a. Meningkatkan akses permodalan
  - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
  - c. Penigkatan pengawasan agroinput
  - d. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktivitas pertanian
  - e. Pengembangan jaringan produk pertanian

- f. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
- g. Pengintergrasian program pertanian

Secara umum, strategi dan arah kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan pada Tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Visi : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan</b>			
<b>Misi 3:</b> Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	1. Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat dalam berusaha tani</li> <li>2. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan</li> <li>3. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani</li> <li>4. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian</li> <li>5. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik</li> <li>7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Petani dan Petugas</li> <li>8. Pengawasan pupuk bersubsidi</li> <li>9. Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>10. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada</li> <li>11. Rehabilitasi Lahan dan Air</li> </ul>
		<p>Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian</li> <li>2. Mendorong tumbuhnya petani milenial</li> <li>3. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 7:</b> Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas			
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya tata Kelola organisasi	Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pemerintah yang baik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD</li> <li>2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan</li> <li>3. Penatausahaan Keuangan OPD</li> <li>4. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Tahunan</li> <li>5. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja</li> </ol>

Sumber: Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021-2026

Adapun Indikaor Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Meningkatkan pendapatan petani	Meningkatnya produksi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	Persentase peningkatan produksi perkebunan :							
			- Kakao	%	1	1	1	1	1	1
			- Karet	%	1	1	1	1	1	1
			- Kopi	%	1	1	1	1	1	1
			- Kelapa Sawi	%	1	1	1	1	1	1
			- Kelapa	%	1	1	1	1	1	1

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SAT	TARGET					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			- Gambir Persentase peningkatan produksi Tanaman Pangan :	%	1	1	1	1	1	1
			- Padi	%	2	2	2	2	2	2
			- Jagung	%	3	3,2	3,5	3,6	3,8	3,9
			Persentase peningkatan produksi Hortikultura :							
			- Cabe	%	2	2	2	2	2	2
			- Bawang merah	%	2	2	2	2	2	2
			- Manggis	%	2	2	2	2	2	2
			- Jeruk	%	1	1	1	1	1	1
II	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Meningkatnya tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	-	71	74	75	76	77	78

Sumber : Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

### 3.2.3 Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhaq Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-3 yaitu Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pembangunan peternakan dan kesehatan hewan pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan melalui pengembangan usaha peternakan berbasis kawasan sesuai potensi wilayahnya.

#### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat**

Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu yang dapat mendorong pembangunan peternakan di Sumatera Barat.

**Tabel 3.5**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas**  
**Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian		Pendapatan Peternak	Rp. jt	47.872	50.265	52.779	55.418	58.199	
		1.	Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (Daging)	%	1,45	1,51	1,57	1,62	1,68
		2.	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Stratisis	%	3,41	4,71	4,94	5,19	5,48
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B	B (79,00)	B (81,00)	B (82,00)	B (84,00)	B (85,50)		

Sumber : Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. **Meningkatnya Pendapatan Petani Pertanian (Peternak)**  
Adapun indikator tujuan dan target tujuan adalah Pendapatan Peternak sebesar Rp.58.199.000,- pada tahun 2026.
2. **Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani**

Adapun Indikator tujuan dan target tujuan adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target BB dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal dengan target B pada tahun 2026.

Sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. **Meningkatnya Produksi Peternakan**, dengan indikator sebagai berikut : Persentase peningkatan produksi peternakan khususnya daging, target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 1,45% dan pada akhir periode tahun 2026 sebesar 1,68%.
2. **Meningkatnya Status Kesehatan Hewan**, dengan indikator sebagai berikut : Persentase penurunan penyakit hewan menular strategis, target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah 3,41% dan pada akhir periode tahun 2026 sebesar 4,58%.
3. **Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Organisasi**, dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan nilai BB.

Untuk pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan, dengan cara :
  - a. Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan (Renja, RKT, Perjanjian Kinerja)
  - b. Meningkatkan kualitas pelaporan organisasi
  - c. Tingkat kesesuaian program/kegiatan yang ada di Renstra dengan yang ada di DPA
2. Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan dengan cara : meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan, dan meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan berlaku.
3. Meningkatkan pengawasan internal organisasi dengan cara meningkatkan tindak lanjut temuan Inspektorat, dan meningkatkan pejabat ASN yang mengisi LHKASN.



**4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**, dengan indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan nilai B.

Untuk pencapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan cara : ketersediaan data kepegawaian yang akurat, meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana dan pengelolaan BMD.

### **Strategi dan Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam lima tahun mendatang. Strategi dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah teknik untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bagaimana cara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat.

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan visi Gubernur Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kelembagaan bidang pertanian (BUMD pertanian)
2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor, peternakan
3. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna
4. Pengembangan *system value chain*
5. Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan

Selanjutnya arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dalam mensukseskan visi dan misi Gubernur Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2021-2026**

<b>VISI</b> : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
<b>MISI 3</b> : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Produksi Peternakan	1. Optimalisasi Kelembagaan bidang pertanian (BUMD pertanian)	1. Mendorong pengelolaan dan pembentukan BUMD profesional bidang Pertanian
		2. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor peternakan	2. Meningkatkan penyediaan dan benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
			3. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
			4. Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
			5. Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian/peternakan
			6. Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
			7. Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
			8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas
			9. Peningkatan nilai tambah produk hasil peternakan
			10. Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani
			11. Rehabilitasi lahan dan air
			12. Meningkatkan produksi padi dan jagung serta beberapa komoditas ternak
			13. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna	1. Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk peternakan 2. Mendorong tumbuh petani milenial 3. Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian
		4. Pengembangan system value chain	1. Meningkatkan akses permodalan 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan tani 3. Peningkatan pengawasan Agro input 4. Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas peternakan 5. Pengembangan jaringan pemasaran produk peternakan 6. Meminimalisir resiko kerugian usaha tani 7. Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup
		5. Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan	1. Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan dan peternakan
	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan	1. Mempertahankan status daerah bebas Hog Cholera dan Brucellosis	1. Penguatan otoritas veteriner di daerah (Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas) 2. Meningkatkan Surveilans dan Monitoring Penyakit Hewan
		2. Menurunkan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)	1. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular 2. Mengembangkan jejaring dan sistem informasi kesehatan hewan (Sikhnas) 3. Penguatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet 4. Meningkatkan Pengawasan Peredaran Obat Hewan, Sarana dan Bahan Medik 5. Meningkatkan Pelayanan kesehatan hewan di Unit – Unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>6. Meningkatkan akurasi data base penyakit hewan menular strategis dan zoonosis</p> <p>7. Pemberdayaan jabatan fungsional medik dan paramedik veteriner</p> <p>8. Mengembangkan sistem akreditasi laboratorium veteriner</p> <p>9. Membangun sistem kompetensi profesi medik dan paramedik veteriner</p> <p>10. Meningkatkan Kesiagaan Darurat Penyakit Eksotik melalui program kesiagaan darurat veteriner Indonesia (KIATVETINDO)</p> <p>11. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan</p> <p>12. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular</p>
2. Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya kualitas pelaporan organisasi	<p>1. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan organisasi</p>	<p>1. Peningkatan pemantauan dan pengendalian terutama pada saat pelaksanaan kegiatan</p> <p>2. Peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peningkatan kualitas pelaporan</p> <p>1. Peningkatan kualitas basis data perencanaan</p>
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	<p>1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan organisasi melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas Sumber Daya Aparatur, penataan organisasi, tatalaksana, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja organisasi, peningkatan pengawasan,</p>	<p>1. Meningkatkan budaya kinerja aparatur</p> <p>2. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan</p> <p>3. Melaksanakan Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi dan tepat ukuran</p> <p>4. Meningkatkan pelaksanaan dan pengembangan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik secara konsisten</p> <p>5. Peningkatan diklat bagi aparatur</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Pengembangan jabatan fungsional aparatur.
			7. Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah
		2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan	1. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur

Sumber : Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

## PROGRAM UNGGULAN

Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 juga didukung dengan Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2021-2026 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

### Sumbar Sejahtera

Kesejahteraan merupakan tujuan hakiki dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi semakin kuat apabila didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki. Sumatera Barat merupakan daerah yang berbasis kepada agraris, baik sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang ditunjukkan oleh peran terbesar dalam perekonomian. Diikuti oleh penduduk yang bekerja di sektor pertanian merupakan yang terbesar dan separuh penduduk menggantungkan hidupnya dari pertanian. Pembangunan pertanian diupayakan untuk mencapai kesejahteraan petani melalui upaya peningkatan nilai tambah dan produktivitas.

Sumbar sejahtera ditujukan untuk : Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian, Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas temak, Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian, Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif, dan lain sebagainya,

### **3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat**

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2021 – 2026. Sebagai gambaran tentang apa yang diinginkan diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut sebagai visi provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan sampai akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD tahun 2021 – 2026.

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

#### **“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”**

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dan Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020 – 2024 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025. Untuk memahami visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut :

#### **Masyarakat Madani**

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak azasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang Madani tentu selaras dengan adat dan budaya minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

## **Sumatera Barat Yang Unggul**

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global. Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing baik ditingkat regional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, industry kecil dan menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

### **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera.

## **TUJUAN**

1. Meningkatnya pendapatan, dengan indikator :
  1. Jumlah pendapatan nelayan (Rp./org/th).
  2. Jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/th)
2. Meningkatnya pelestarian lingkungan perairan, dengan indikator :
  1. Persentase efektivitas pengelolaan kawasan perairan
3. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator
  1. Nilai Akuntabilitas Kinerja
  2. Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi

## **SASARAN**

Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap  
indikator:
  - a. Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sebesar 0,99% pada tahun 2022 : 1,07% pada tahun 2023 : 1,09 pada tahun 2024 : 1,11 pada tahun 2025 dan 1,17 pada tahun 2026.

2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Indikator :

- a. Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 3,33% pada tahun 2022 : 3,39% pada tahun 2023 : 3,71% pada tahun 2024 : 3,78% pada tahun 2025 dan 3,97% pada tahun 2026

3. Meningkatnya pemasaran produk perikanan

indikator :

- a. Nilai ekspor hasil perikanan, sebesar 155,50 Milyar pada tahun 2022 : 156,85 Milyar pada tahun 2023 : 158,42 Milyar pada tahun 2024 : 160 Milyar pada tahun 2025 dan 161,60 Milyar pada tahun 2026

4. Meningkatnya produksi olahan perikanan

Indicator :

- a. Persentase produksi olahan hasil perikanan, sebesar 6,49% pada tahun 2022 : 7,26% pada tahun 2023 : 7,95% pada tahun 2024 : 8,05 % pada tahun 2025 dan 11% pada tahun 2026

5. Meningkatnya pengelolaan lingkungan perairan

Indikator :

- a. Persentase efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, sebesar 47,06% pada tahun 2022 : 52,94% pada tahun 2023 : 58,2% pada tahun 2024 : 64,71% pada tahun 2025 dan 70,59% pada tahun 2026

6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi :

Indikator :

- a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD : Nilai A.

7. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi

Indikator :

- a. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi : Nilai B



**Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 – 2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke				
					2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Pendapatan	1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17
		2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya	- Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97
		3. Meningkatkan Pemasaran Produk Perikanan	- Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Milyar	155,50	156,85	158,42	160	161,60
		4. Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	- Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	%	6,49	7,26	7,95	8,05	11
2.	Meningkatnya pelestarian lingkungan perairan	1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan perairan	- Persentase efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	%	47,06	52,94	58,2	64,71	70,59
3.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Organisasi	- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai	A	A	A	A	A
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	- Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai	B	B	B	B	B

Dokumen Acuan : Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 permasalahan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.8 Permasalahn Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Kawasan Budidaya	Sosialisasi Perda No 2 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan penduduk yang setiap Tahun meningkat.</li> <li>2. Perkembangan pembangunan makin meningkat yang mengakibatkan alih fungsi lahan</li> <li>3. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi perumahan belum memperhatikan peraturan-peraturan yang ada khususnya dalam penyelamatan lahan pertanian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan Masih Belum Optimal.</li> <li>2. Kebutuhan Atas Pangan Yang Semakin Meningkat.</li> <li>3. Adanya Perda No 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang beserta turunannya</li> <li>4. Intensifikasi pertanian melalui penerapan teknologi baru</li> </ol>

### 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

#### 1. ASPEK TEKNIS

- a. Belum beragamnya pola konsumsi pangan
- b. Fluktuasi produksi, populasi dan produktivitas pertanian;
- c. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/hewan;
- d. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan
- e. Rendahnya aspek kepemilikan lahan karena sebagian besar petani adalah petani penggarap.

#### 2. ASPEK EKONOMIS

- a. Fluktuasi harga pangan;
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian;
- c. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
- d. Belum optimalnya pasar yang menampung hasil produksi pertanian; dan
- e. Rendahnya pendapatan petani.

#### 3. ASPEK SOSIAL

- a. Lemahnya kelembagaan tani;
- b. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia pertanian;
- c. Tingginya upah tenaga kerja usaha tani, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain yang upah tenaga kerja lebih rendah;
- d. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
- e. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- f. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun; dan
- g. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian.

#### 4. ASPEK EKOLOGIS

- a. Pengembangan teknologi belum sepenuhnya berwawasan lingkungan; dan
- b. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang, maka Dinas Pangan dan Pertanian telah merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

**Tujuan :**

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian;
2. Menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian

**Sasaran :**

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan;
2. Meningkatnya Produksi / Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatnya Adopsi Inovasi Teknologi;
4. Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima bansos, dan
5. Meningkatnya Produksi / Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan.

Dengan Berpedoman pada tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Padang Panjang di atas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang selama periode 2024-2026 sebagaimana terlihat dalam tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian**  
**Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(6)
	<b>Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian</b>		<b>LPE Sektor Pertanian</b>		5,64	5,69	5,74
1.		Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Cara Perhitungan PPH: 1. % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 2. Skor AKE = % AKE x bobot 3. Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal. Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE 4. Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 Kelompok pangan	86,1	86,2	86,3
2.		Meningkatnya Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Produktivitas Padi	Jumlah produksi padi/ ha (ton/ ha)	6,5	6,6	6,7
			2. Produktivitas Susu Sapi Perah	Jumlah produksi susu sapi perah (liter/ ekor/ hari)	11,80	11,85	11,90
			3. Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	0,13	0,13	0,13
3.		Meningkatnya adopsi inovasi teknologi	1. Adopsi Inovasi Teknologi	Persentase penerapan inovasi teknologi	33,3	66,7	100,0
	<b>Menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian</b>		<b>Tingkat kemiskinan</b>		4,24	3,79	3,34
4.		Meningkatnya pendapatan petani penerima bansos	1. Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	Pendapatan petani setelah diberi bantuan sosial dibagi dengan pendapatan petani sebelum diberibantuan soasial dikali 100%	8	8,5	9
	<b>Meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian</b>		<b>Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)</b>		11,328	11,378	11,453
5.		Meningkatnya Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Produktivitas Padi	Jumlah produksi padi/ ha (ton/ ha)	6,5	6,6	6,7
			2. Produktivitas Susu Sapi Perah	Jumlah produksi susu sapi perah (liter/ ekor/ hari)	11,80	11,85	11,90
			3. Peningkatan Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	0,13	0,13	0,13

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Tujuan Pertama yang ditetapkan adalah meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian, dengan indikatornya yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian. Target kinerja LPE sektor pertanian untuk tahun 2024 adalah 5,64 (indeks), pada tahun 2025 adalah 5,69 (indeks) dan pada tahun 2026 adalah 5,74 (indeks). Selanjutnya, Sasaran pertama dari tujuan pertama adalah meningkatnya ketahanan pangan. Adapun yang menjadi indikator sasarnya adalah skor pola pangan harapan (PPH) dengan target 86,1 (indeks) pada tahun 2024, 86,2 (indeks) pada tahun 2025, dan 86,3 pada tahun 2026.

Berikutnya, sasaran kedua dari tujuan pertama adalah meningkatnya produksi/produktivitas sektor pertanian dan perikanan, dengan indikator :

1. Produktivitas padi

Target produktivitas padi pada tahun 2024 adalah 6,5 ton/ha, target untuk tahun 2025 adalah 6,6 ton dan target pada tahun 2026 adalah 6,7 ton/ha. Upaya peningkatan produktivitas padi dilakukan dengan mengoptimalkan sumberdaya lahan yang masih tersedia yang dilakukan dengan lebih efisien pada lahan-lahan yang sesuai atau lahan dengan kondisi fisik yang sangat mendukung dan juga dengan penggunaan teknologi tepat guna.

2. Produktivitas susu sapi perah

Target produktivitas susu sapi perah pada tahun 2024 adalah 11,80 liter/ekor/hari, kemudian target untuk tahun 2025 adalah 11,85 liter/ekor/hari dan target untuk tahun 2026 adalah 11,90 liter/ekor/hari. Rata-rata produksi susu sapi laktasi adalah 10-11 liter/hari. Produksi susu per hari di Kota Padang Panjang berkisar 1.200 sampai dengan 1.800 liter/hari. Produksi susu dari Kota Padang Panjang mampu menyumbang sebanyak 60% produksi susu keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata produksi susu nasional di angka 8-10 susu/ekor/ hari, sedang produksi susu sapi perah Kota Padang Panjang sudah di atas 10-11 liter/ ekor/ hari. Upaya untuk peningkatan produktivitas susu sapi perah sangat didukung oleh ketersediaan bibit unggul, penyediaan pakan, ketersediaan sarana dan prasarana serta teknik pengolahan dan pemasaran susu.

### 3. Peningkatan produksi perikanan

Target peningkatan produksi perikanan untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 adalah meningkat 0,13 % setiap tahunnya. Sektor perikanan, khususnya perikanan air tawar dilakukan dalam skala kecil karena keterbatasan lahan dan lingkungan padat penduduk. Pengembangan usaha perikanan di Kota Padang Panjang sangat tergantung pada ketersediaan benih dan induk ikan unggul. Hal ini dikarenakan induk dan benih ikan yang unggul merupakan sarana produksi yang mutlak dan akan menentukan keberhasilan budidaya perikanan. Untuk menunjang pencapaian target kinerja diatas sangat didukung dengan tersedianya luas lahan budidaya perikanan sebesar 5,14 ha, sarana dan prasarana budidaya perikanan, ketersediaan bibit unggul di UPTD BBI dan dukungan petani ikan.

Selanjutnya, sasaran ketiga dari tujuan pertama adalah meningkatnya adopsi teknologi. Adapun yang menjadi indicator sasarannya adalah adopsi inovasi teknologi dengan target 33,3% di tahun 2024, 66,7% di tahun 2025 dan 100% di tahun 2026.

Tujuan kedua yang ditetapkan pada renstra Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2024-2026 yaitu menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian, dengan indicatornya adalah Tingkat Kemiskinan. Target kinerja dari indicator Tingkat Kemiskinan yaitu pada tahun 2024 adalah 4,24 %, tahun 2025 adalah 3,79% dan pada tahun 2026 ditargetkan menurun sebesar 3,34%. Kemudian Sasaran dari tujuan kedua ini adalah meningkatnya pendapatan petani penerima bansos, dengan indikator persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos. Sepanjang tahun 2024-2026 target sasaran dari tujuan kedua ini meningkat secara berturut-turut yaitu 8% untuk tahun 2024, 8,5% untuk tahun 2025 dan 9% untuk tahun 2026. Hal ini didukung dengan meningkatnya bantuan sosial setiap tahunnya baik berasal dari dana APBD, APBD Provinsi dan Dana APBN.

Tujuan ketiga yang ditetapkan pada renstra Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian, dengan indicator kinerja Pengeluaran Perkapita. Adapun target dari indicator pengeluaran perkapita untuk tahun 2024 adalah 11,328, tahun 2025 adalah sebesar 11,378 dan pada tahun 2026 sebesar 11,453. Kemudian Sasaran dari



tujuan ketiga ini adalah meningkatnya produksi/produktivitas sektor pertanian dan perikanan, dengan indicator :

1. Produktivitas padi

Target produktivitas padi pada tahun 2024 adalah 6,5 ton/ha, target untuk tahun 2025 adalah 6,6 ton dan target pada tahun 2026 adalah 6,7 ton/ha.

2. Produktivitas susu sapi perah

Target produktivitas susu sapi perah pada tahun 2024 adalah 11,80 liter/ekor/hari, kemudian target untuk tahun 2025 adalah 11,85 liter/ekor/hari dan target untuk tahun 2026 adalah 11,90 liter/ekor/hari

3. Peningkatan produksi perikanan

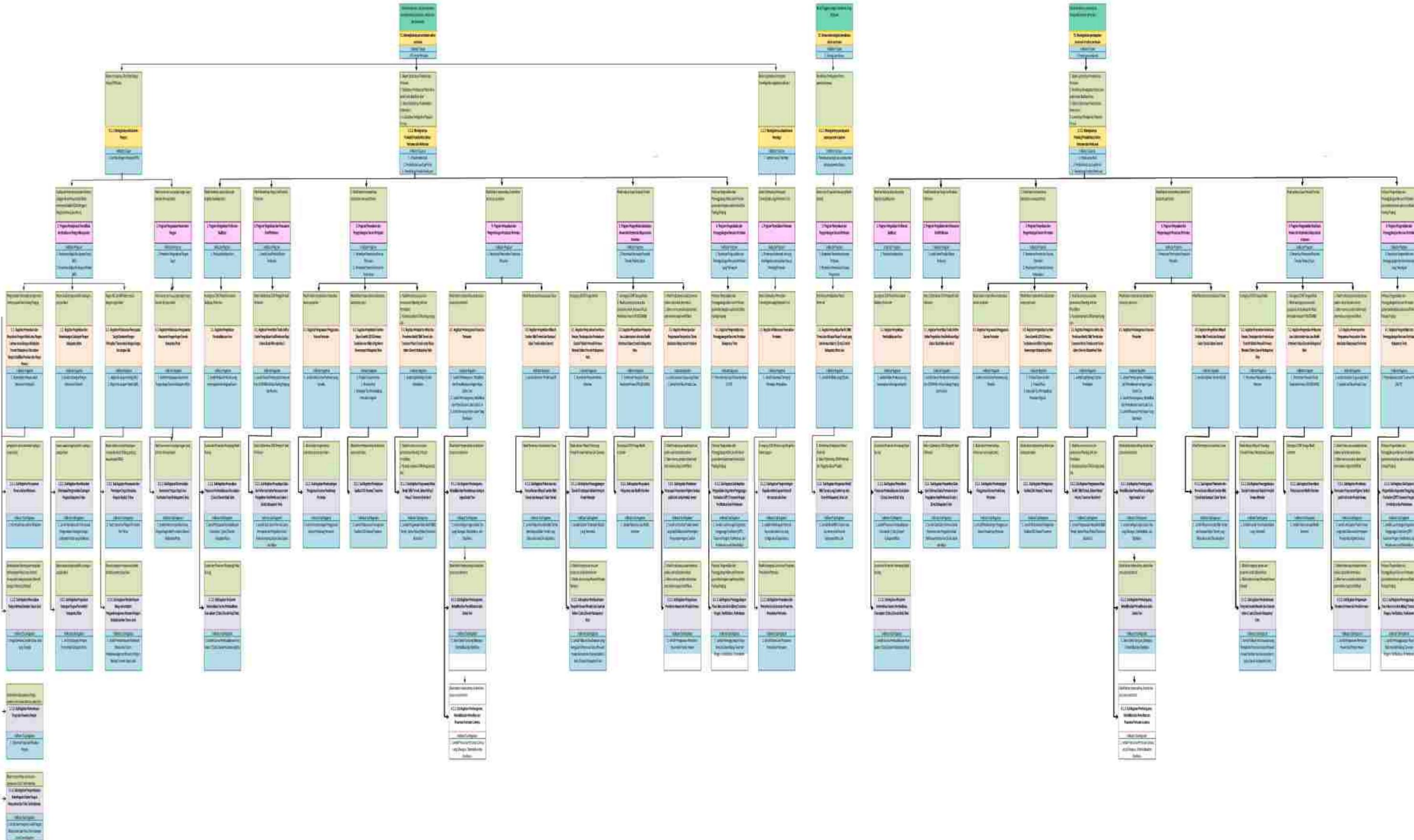
Target peningkatan produksi perikanan untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 adalah meningkat 0,13 % setiap tahunnya.

#### **4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah**

Untuk menggambarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada cascading Kinerja berikut ini.



CASCADING RENCANA STRATEGI (RENSTRA)  
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2024-2026



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD Kota Padang Panjang. Sementara itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

Bedasarkan pengertian dari strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian telah menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan tahapan dan potensi yang ada sebagaimana pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian	1. Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Meningkatkan edukasi pola konsumsi pangan	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi /Pembinaan
		2. Meningkatkan stabilitas pasokan dan harga pangan strategis yang belum optimal	1. Optimalisasi Uji Sampel Pangan 2. Optimalisasi Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan
	2. Meningkatnya Produksi/Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Meningkatkan SDM pengelola tanaman pangan dan hortikultura	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi /Pembinaan
		2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana penunjang pertanian tanaman pangan dan hortikultura	1. Fasilitasi Peningkatan Penyediaan sarana prasarana dan Pemasaran Produk Pertanian
		3. Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi alih fungsi lahan
			2. Memberikan asuransi lahan sawah
		4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman	1. Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan/ sekolah lapang
		5. Meningkatkan SDM peternakan	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi/ pelatihan
		6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana penunjang peternakan	1. Fasilitasi Peningkatan Penyediaan sarana Prasarana peternakan dan Pemasaran Hasil Peternakan
			1. Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan
		7. Meningkatkan pelayanan Kesehatan hewan	2. Peningkatan Kualitas SDM pelayanan kesehatan hewan
		8. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana Pendukung perikanan	1. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan
9. Meningkatkan kualitas SDM pengelola perikanan(pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan)	1. Fasilitasi Peningkatan Pelatihan/ Bimtek		
3. Meningkatnya adopsi inovasi teknologi	1. Meningkatkan adopsi inovasi teknologi	1. Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan/ pelatihan /demplot	

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
		2. Meningkatkan penguatan Kelembagaan Kelompok Pertanian dan Perikanan	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi/ pelatihan/lomba
Menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian	1. Meningkatnya pendapatan petani penerima bansos	1. Memberikan bantuan ternak sesuai permintaan calon penerima bansos	1. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi /Pembinaan
		2. Pembinaan dan evaluasi perkembangan penerima bantuan sosial	1. Optimalisasi Peningkatan Pembinaan dan evaluasi
Meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian	1. Meningkatnya Produksi/Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	1. Pemakaian teknologi di bidang pertanian	1. Meningkatkan kemampuan SDM petani dalam penggunaan teknologi pertanian

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Berdasarkan table 5.1 diatas, Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026 memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian
2. Menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian diatas, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketahanan pangan
2. Meningkatnya Produksi/Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan
3. Meningkatnya adopsi inovasi teknologi

Untuk mencapai tujuan menurunkan tingkat kemiskinan sektor pertanian, dirumuskan sasaran meningkatnya pendapatan petani penerima bansos. Selanjutnya untuk mencapai tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat sektor pertanian dirumuskan dengan sasaran meningkatnya Produksi/Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemudian Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini dilakukan pemutakhiran pada tahun 2020 yaitu dengan ditetapkannya Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan indikatif ini direncanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sebagai pedoman di dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program, kegiatan dan subkegiatan serta pendanaan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagaimana dapat dilihat pada tabel Tabel 6.1 berikut:











Tahun	Isu	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program, Indikator, dan Kegiatan (Subsidi)	Definisi Operasional	Satuan	Kendali Kunci (2023)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan						Kendali Kunci Pada Akhir Periode Rencana Kegiatan Daerah	Uraian Kerja Perangkat Daerah/Penyaji yang diarahkan	Lokasi			
								2024		2025		2026					Kendali Kunci Pada Akhir Periode Rencana Kegiatan Daerah		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	
1	Peningkatan dan Pengembangan Bercocok Beranam			Peningkatan dan Pengembangan Bercocok Beranam	Jumlah sarana pertanian yang disediakan atau dibangun ulang dengan jumlah sarana pertanian yang tidak dibayar sebagai subsidi	%	82	75	10.000.000	83	14.763.000	85	22.084.000	85	11.846.000		17	18	
								84	10.000.000	97	10.763.000	97	22.084.000	97	11.846.000				
								86	10.000.000	100	10.763.000	100	22.084.000	100	11.846.000				
								88	10.000.000	103	10.763.000	103	22.084.000	103	11.846.000				
								90	10.000.000	106	10.763.000	106	22.084.000	106	11.846.000				
	Peningkatan dan Pengembangan Bercocok Beranam				Peningkatan dan Pengembangan Bercocok Beranam	Jumlah Luas Sarung Duganera Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikonstruksi	%	100	10	10.000.000,00	12	6.792.000,00	13	10.000.000	13	11.846.000			
									11	10.000.000,00	14	6.792.000,00	15	10.000.000	15	11.846.000			
									12	10.000.000,00	16	6.792.000,00	17	10.000.000	17	11.846.000			
									13	10.000.000,00	18	6.792.000,00	19	10.000.000	19	11.846.000			
									14	10.000.000,00	20	6.792.000,00	21	10.000.000	21	11.846.000			
Peningkatan dan Pengembangan Bercocok Beranam				Peningkatan dan Pengembangan Bercocok Beranam	Jumlah Sarung Duganera Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikonstruksi	%	100	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0					
								1	10.000.000,00	1	0	1	0	1				0	
								2	10.000.000,00	2	0	2	0	2				0	
								3	10.000.000,00	3	0	3	0	3				0	
								4	10.000.000,00	4	0	4	0	4				0	
2	Meningkatkan hasil ikan			Adaptasi Iklim Teknologi	Peningkatan pemukiman iklim teknologi	%	70,6	66,7	0	68,8	0	69,9	0	70,0	0				
								69,9	0	71,9	0	73,9	0	75,0	0				
								72,2	0	74,4	0	76,7	0	77,8	0				
								74,7	0	76,9	0	79,1	0	80,2	0				
								77,2	0	79,3	0	81,5	0	82,6	0				
3	Meningkatkan pendapatan petani perikanan			Peningkatan Pendapatan Petani Perikanan	Peningkatan jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan teknis yang dibayar sebagai subsidi	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000				
								100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000				
								100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000				
								100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000				
								100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000				
3	Meningkatkan pendapatan petani perikanan			Peningkatan Pendapatan Petani Perikanan	Jumlah Sarung Duganera Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikonstruksi	%	100	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
3	Meningkatkan pendapatan petani perikanan			Peningkatan Pendapatan Petani Perikanan	Jumlah Sarung Duganera Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikonstruksi	%	100	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
3	Meningkatkan pendapatan petani perikanan			Peningkatan Pendapatan Petani Perikanan	Jumlah Sarung Duganera Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikonstruksi	%	100	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				
								1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00				



Tahun	Bawahan	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program (Jumlah) dan Kegiatan (Jumlah)	Definisi Operasional	Satuan	Kendali Fisik (2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan						Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Pelaksanaan Daerah		Unit Kerja Penyelenggara Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah	
								2024		2025		2026		2027				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			14.1 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pemadatan Berhut/ Wad/ Terak dan Tanaman Pekar/ Terak serta Pekar dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sapu Feeding Unit dan Revisiblen	Jumlah Sapu Feeding Unit dan Revisiblen dalam satu tahun	Sapu	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14.2 Sub kegiatan Penguatan Mutu Berhut/ Wad/ Terak, Bahan Pekar/ Pekar/ Tanaman Baka Kad	Jumlah Penguatan Mutu Berhut/ Wad/ Terak, Bahan Pekar/ Pekar/ Tanaman Baka Kad	Jumlah Penguatan Mutu Berhut/ Wad/ Terak, Bahan Pekar/ Pekar/ Tanaman Baka Kad	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14 Program Penguatan dan Pengembangan Prasarana Perairan	Pemeliharaan Perairan Perairan Pemeliharaan perairan pemeliharaan	Jumlah pemeliharaan perairan yang tersedia dibagi jumlah pemeliharaan yang dibutuhkan dibagi dengan biaya pemeliharaan perairan yang dibutuhkan adalah 1) (jika ada) dan 2) (jika ada) jumlah pemeliharaan perairan yang tersedia dibagi jumlah pemeliharaan yang dibutuhkan adalah 1) (jika ada) dan 2) (jika ada) Revisi yang diperlukan	%	75	77	80	80	81	81	81	81	81	81	81	81
			14.1 Kegiatan Pengembangan Prasarana Perairan	Jumlah Pengembangan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan saluran irigasi Uluwa Terak	Jumlah Pengembangan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan saluran irigasi Uluwa Terak dalam satu tahun	Lap	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Pengembangan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Uluwa Terak	Jumlah Pengembangan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Uluwa Terak dalam satu tahun	Lap	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Jumlah Prasarana Perairan Yang Disediakan	Jumlah Prasarana Perairan Yang Disediakan dalam satu tahun	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14.1.1 Sub kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan saluran irigasi Uluwa Terak	Jumlah saluran irigasi Uluwa Terak yang Dibangun, Diharapkan dan Diharapkan	Jumlah saluran irigasi Uluwa Terak yang Dibangun, Diharapkan dan Diharapkan	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			14.1.2 Sub kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Uluwa Terak	Jalan Uluwa Terak yang Dibangun, Diharapkan dan Diharapkan	Jumlah Jalan Uluwa Terak yang Dibangun, Diharapkan dan Diharapkan	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			14.1.3 Sub kegiatan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pemeliharaan Prasarana Perairan Lainnya	Jumlah Prasarana Perairan Lainnya yang Dibangun, Diharapkan dan Diharapkan	Jumlah Prasarana Perairan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			14.2 Kegiatan Penguatan Wilayah Sumber Biot Terak dan Rumpun/ Galur Terak dalam Daerah	Jumlah Kriteria Terak Real IB	Jumlah Kriteria Terak Real IB dalam satu tahun	Sapu	37	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
			14.2.1 Sub kegiatan Penguatan dan Pemeliharaan Wilayah Sumber Biot Terak dan Rumpun/ Galur Terak	Jumlah Wilayah Sumber Biot Terak dan Rumpun/ Galur Terak yang Dibangun dan Diharapkan	Jumlah Wilayah Sumber Biot Terak dan Rumpun/ Galur Terak yang Dibangun dan Diharapkan	Laporan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			14.2.2 Sub kegiatan Penguatan dan Pemeliharaan Wilayah Sumber Biot Terak dan Rumpun/ Galur Terak	Pemeliharaan Perairan Perairan Pemeliharaan Perairan Pemeliharaan	Jumlah Pemeliharaan Perairan Perairan Pemeliharaan Perairan Pemeliharaan yang tersedia dalam bentuk laporan dibagi jumlah biaya pemeliharaan perairan yang dibutuhkan adalah 1) (jika ada) dan 2) (jika ada) Revisi yang diperlukan	%	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Tahun	Bawahan	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program (Subsasaran) dan Kegiatan (Subsidi)	Definisi Operasional	Satuan	Kendali Mutu (2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan								Lain-lain Kegiatan Operasional yang dapat menunjang pencapaian	Tipe	
								2024		2025		2026		Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Pelaksanaan Daerah				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			13.1	Kegiatan Perencanaan Kesehatan, Penelitian dan Promosi Kesehatan Wilayah Persepsi Kesehatan Masyarakat Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemertua Pelayanan Kesehatan	Jumlah masyarakat potensial/penderita penyakit yang telah diayak dalam satu tahun/diikuti dengan jumlah pelayanan yang dapat dilakukan di hari senasuk jamak	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-
			13.1.1	Sub kegiatan Pengabdian dan Peningkatan Persepsi Kesehatan dan Kesehatan	Jumlah Wilayah Pengabdian dan Peningkatan Persepsi Kesehatan dan Kesehatan	Jumlah Wilayah Pengabdian dan Peningkatan Persepsi Kesehatan dan Kesehatan	Laporan	1	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
			13.1.2	Sub kegiatan Peningkatan Persepsi Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan Kesehatan	Jumlah Daerah Terpencil/ Wilayah yang Terpencil	Jumlah Daerah Terpencil/ Wilayah yang Terpencil	Laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
			13.1.3	Sub kegiatan Pemertuaan Persepsi Kesehatan Melalui dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Pemertuaan Persepsi Kesehatan Melalui dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Pemertuaan Persepsi Kesehatan Melalui dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	100%	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
			13.1.4	Sub kegiatan Pembinaan Persepsi Kesehatan Melalui dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah atau Kabupaten yang Mengalami Pemertuaan Persepsi Kesehatan Melalui dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah atau Kabupaten yang Mengalami Pemertuaan Persepsi Kesehatan Melalui dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	100%	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
			13.2	Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Laboratorium dan Unit Kesehatan Masyarakat Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pemertua Pelayanan Publik Kesehatan Masyarakat (PUSKODUKMAS)	Jumlah Pasien yang dapat diayak dalam satu tahun dibagi jumlah pasien yang datang ke PUSKODUKMAS di hari senasuk jamak	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	-	-
			13.2.1	Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Kesehatan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
			13.3	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Persepsi Kesehatan Masyarakat Melalui	Jumlah Masyarakat Desa yang Dibuat	Jumlah Masyarakat Desa yang Dibuat dalam satu tahun	Desa	0	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
					Jumlah Sertifikasi Produk Desa	Jumlah Sertifikasi Produk Desa dalam satu tahun	Sertifikasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
			13.3.1	Sub kegiatan Peningkatan Persepsi Kesehatan Masyarakat Melalui	Jumlah Peningkatan Unit Usaha Kesehatan dan Produk Kesehatan	Jumlah Peningkatan Unit Usaha Kesehatan dan Produk Kesehatan	Laporan	100%	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
			13.3.2	Sub kegiatan Peningkatan Persepsi Kesehatan Masyarakat Melalui	Jumlah Unit Usaha Produk Kesehatan yang telah Didata untuk Peningkatan Persepsi Kesehatan Masyarakat	Jumlah Jumlah Unit Usaha Produk Kesehatan yang telah Didata untuk Peningkatan Persepsi Kesehatan Masyarakat	Unit Usaha	100%	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
			13.3.3	Sub kegiatan Peningkatan Persepsi Kesehatan Masyarakat Melalui	Jumlah Peningkatan Persepsi Kesehatan Masyarakat dan Produk Kesehatan	Jumlah Peningkatan Persepsi Kesehatan Masyarakat dan Produk Kesehatan	Laporan	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
			14	Program Pengabdian dan Peningkatan Bersama Perikanan	Pemertua Pengabdian dan Peningkatan Bersama Perikanan yang Terpencil	Jumlah desa/ kecamatan yang diberlakukan atau dibantu/ diikut dengan bentuk layanan perikanan yang dapat diayak senasuk jamak	%	10	75%	-	80%	-	85%	-	85%	-	-	-
			14.1	Kegiatan Pengabdian dan Peningkatan Bersama Perikanan Kabupaten/ Kota	Pemerit Asuransi Usaha Tani Perikanan (AUTP)	Pemerit Asuransi Usaha Tani Perikanan (AUTP)	Ha	12000	140	-	140	-	140	-	140	-	-	-
			14.1.1	Sub kegiatan Pengabdian dan Peningkatan Bersama Perikanan Kabupaten/ Kota	Jumlah Luas Sarung Perikanan Pengembang Tumbuhan (OPT) Tani Perikanan, Hortikultura dan Perikanan yang Diperbaiki	Jumlah Luas Sarung Perikanan Pengembang Tumbuhan (OPT) Tani Perikanan, Hortikultura dan Perikanan yang Diperbaiki	Ha	100	10	-	10	-	10	-	10	-	-	-

Tahun	Daerah	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program, Indikator dan Kegiatan (subdi)	Definisi Operasional	Satuan	Kendali Fisik (2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan						Kendali Kinerja Fisik Akhir Periode Rencana Pelaksanaan Daerah	Lokasi	Jumlah		
								2024		2025		2026					Kendali Kinerja Fisik Akhir Periode Rencana Pelaksanaan Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			10.1.0 Sub Kegiatan Pengembangan Pemasaran Alam Seling Terpadu Pangan, Hortikultura, Perikanan, Perikanan dan Perikanan Hutan	Jumlah Pengembangan Pemasaran Alam Seling Terpadu Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Perikanan Hutan	Jumlah Pengembangan Pemasaran Alam Seling Terpadu Pangan, Hortikultura, Perikanan dan Perikanan Hutan	Lapangan	12	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-
			10.1.0 Sub Kegiatan Pengembangan Pemasaran Alam Seling Terpadu Pangan, Hortikultura, Perikanan	Jumlah Pengembangan Pemasaran Alam Seling Terpadu Pangan, Hortikultura, Perikanan	Jumlah Pengembangan Pemasaran Alam Seling Terpadu Pangan, Hortikultura, Perikanan Hutan	Lapangan	12	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-
4	Terpadunya			Realisasi Pemenuhan Penyumbang yang Diusulkan		%	80	100		100		100		100				
	Usaha Penyumbang			Realisasi pemenuhan usaha penyumbang yang diusulkan		%	80	100		100		100		100				
		6	Terwujudnya															
				10 Program Penyumbang Usaha Pemenuhan Daerah (Kategori) A/B/C	Perentase Pemenuhan Penyumbang yang Diusulkan	Perentase Pemenuhan Penyumbang yang Diusulkan	%	80	100	7.490.113.800	100	7.530.113.800	100	8.115.000.000	100	12.310.100.000		
				10.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Penyumbang Daerah	Perentase Layanan Keuangan Penyumbang Daerah	Perentase Layanan Keuangan Penyumbang Daerah	%	80	100	6.130.488.000	100	6.130.488.000	100	6.130.488.000	100	18.300.488.000		
				10.1.0 Sub Kegiatan Pemukiman (A) dan Turun-turun (A/B)	Jumlah Orang yang Menerima (A) dan Turun-turun (A/B)	Jumlah Orang yang Menerima (A) dan Turun-turun (A/B)	orang/bulan	34	34	6.130.488.000	34	6.130.488.000	34	6.130.488.000	34	18.300.488.000		
				10.1.1 Kegiatan Administrasi Manajemen Penyumbang Daerah	Perentase Pemenuhan Layanan Keagamaan	Perentase Pemenuhan Layanan Keagamaan	%	80	100	24.000.000	0	-	100	27.000.000,00	100	31.000.000,00		
				10.1.2 Sub Kegiatan Pengadaan Fasilitas Dasar Sektora Agraria	Jumlah Fasilitas Dasar Sektora Agraria yang Dibangun	Jumlah Fasilitas Dasar Sektora Agraria yang Dibangun	Fasilitas	1/1	34	14.000.000	0	-	100	17.000.000	100	31.000.000		
				10.1.3 Kegiatan Administrasi Umum Penyumbang Daerah	Perentase Pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan	Perentase Pemenuhan Layanan Administrasi Pemerintahan	%	80	100	168.000.000	100	168.000.000	100	201.000.000	100	1.000.000.000		
				10.1.4 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Fasilitas Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididatikan	Jumlah Fasilitas Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididatikan	Fasilitas	11	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	1	48.000.000		
				10.1.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Fasilitas Bahan Logistik Kantor yang Dididatikan	Jumlah Fasilitas Bahan Logistik Kantor yang Dididatikan	Fasilitas	1	1	130.000.000	1	130.000.000	1	130.000.000	1	280.000.000		
				10.1.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bangun Gedung dan Pengadaan	Jumlah Fasilitas Bangun Gedung dan Pengadaan yang Dididatikan	Jumlah Fasilitas Bangun Gedung dan Pengadaan yang Dididatikan	Fasilitas	4	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	42.000.000		
				10.1.6 Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Koordinasi dan Komunikasi (P2D)	Jumlah Fasilitas Penyediaan Fasilitas Koordinasi dan Komunikasi (P2D)	Jumlah Fasilitas Penyediaan Fasilitas Koordinasi dan Komunikasi (P2D)	Lapangan	101	1	130.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	1	600.000.000		
				10.3 Kegiatan Pengadaan Barang (M/B) Daerah Penyumbang Usaha Pemenuhan Daerah	Perentase Pemenuhan Service dan Pemenuhan Aparatur		%	100	100	30.000.000,00	100	20.000.000,00	100	244.843.800	100	604.843.800		
				10.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Penyumbang Dasar atau Kendaraan Dasar Jabatan yang Dididatikan	Jumlah Unit Kendaraan Penyumbang Dasar atau Kendaraan Dasar Jabatan yang Dididatikan	Jumlah Unit Kendaraan Penyumbang Dasar atau Kendaraan Dasar Jabatan yang Dididatikan	Unit	1/1	0	-	0	-	0	300.000.000	1	600.000.000		
				10.3.2 Sub Kegiatan Pengadaan Perabot dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Perabot dan Meubel Lainnya yang Dididatikan	Jumlah Unit Perabot dan Meubel Lainnya yang Dididatikan	Unit	4	4	30.000.000	4	20.000.000	4	44.843.800	11	114.843.800		
				10.3.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penyumbang Usaha Pemenuhan Daerah	Perentase Capaian Penyediaan Jasa Penyumbang Pemenuhan Daerah	Perentase Capaian Penyediaan Jasa Penyumbang Pemenuhan Daerah	%	80	100	604.824.000,00	100	604.824.000,00	100	604.824.000	100	1.810.870.000		



Tahun	Bantuan	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program (sasaran) dan Kegiatan (subsk)	Definisi Operasional	Satuan	Kendali Fisik (2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan						Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Pelaksanaan Daerah	Lini Kerja Kegiatan dan/atau Program yang diarahkan	Lokasi		
								2024		2025		2026					Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Pelaksanaan Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			13.2.0	Pelayanan Jasa Sura-Melayu	- Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Sura-Melayu	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Sura-Melayu	Laporan	3	2	0.000.000	2	4.000.000	3	4.000.000	3	14.000.000		
			13.2.1	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah Laporan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	600.000.000		
			13.2.2	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	17	2	400.004.000	2	400.004.000	2	400.004.000	12	1.203.072.000		
			13.7	Kegiatan Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Perundang-Undah Pemeliharaan Daerah	- Persentase Capaian Pemeliharaan Bangun Milik Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Bangun Milik Daerah	%	80	100	418.000.000	100	497.000.000	100	497.000.000	100	1.387.000.000		
			13.7.1	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Pemeliharaan Bangun Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan Perbaikan Bangun Milik Daerah dan Pemeliharaan Bangun Milik Daerah	- Jumlah Kebutuhan Perbaikan Bangun Milik Daerah dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Perbaikan	Jumlah Kebutuhan Perbaikan Bangun Milik Daerah dan Pemeliharaan Perbaikan	Unit	35	35	207.000.000	35	207.000.000	35	207.000.000	35	601.000.000		
			13.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangun dan Monev Lainnya yang Diarahkan	- Jumlah Perbaikan dan Monev Lainnya yang Diarahkan	Jumlah Perbaikan dan monev lainnya yang Diarahkan	Unit	1	0	48.000.000	0	48.000.000	0	48.000.000	0	128.000.000		
			13.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangun dan Monev Lainnya yang Diarahkan	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diarahkan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diarahkan/dibangun	Unit	1	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	216.000.000		
			13.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangun dan Monev Lainnya yang Diarahkan	- Luas Tanah yang Diarahkan Pemeliharaan Bangun dan Monev Lainnya yang Diarahkan	Luas Tanah yang Diarahkan Pemeliharaan Bangun dan Monev Lainnya yang Diarahkan	Ha	2	0,5	0.000.000	0,5	2.000.000	0,5	0.000.000	1,8	18.000.000		
TOTAL											8.180.196.400,00		9.240.003.400,00		30.075.497.204,07		28.208.960.000,07	

Sumber Data: Data Pengantar Rencana Kerja Fisik Perang Perang Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum renstra Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2024-2026 terdiri atas 10 program 23 Kegiatan dan 42 subkegiatan. Adapun yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut :

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Indikator dari program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ini adalah :

- a. persentase pemenuhan sarana pertanian, yaitu membandingkan jumlah sarana pertanian yang disediakan dengan jumlah sarana yang dibutuhkan. Adapun target di tahun 2024 adalah 77%, target pada tahun 2025 adalah 80% dan 85% pada tahun 2026. Target sarana yang disediakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah 1)alat tanam, 2)alat pengolah hasil 3)alat panen 4)alat pasca panen 5)alat pengolah tanah 6)sealer, 7)kemasan, 8)pupuk dan 9)pestisida.
- b. persentase pemenuhan sarana peternakan, yaitu membandingkan jumlah sarana peternakan yang disediakan dengan jumlah sarana yang dibutuhkan. Adapun target di tahun 2024 adalah 75%, target pada tahun 2025 adalah 80% dan 85% pada tahun 2026. Target sarana peternakan yang disediakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah sarana puskesmas, sarana Rumah Potong Hewan, dan sarana rearing unit/pembibitan.

2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

Indikator dari program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian ini adalah :

- a. persentase pemenuhan prasarana pertanian, yaitu membandingkan jumlah prasarana pertanian yang disediakan dengan jumlah prasarana yang dibutuhkan. Adapun target di tahun 2024 adalah 77%, target pada tahun 2025 adalah 80% dan 85% pada tahun 2026. Target prasarana yang disediakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah 1)jalan usaha tani dan 2)Irigasi.
- b. persentase pemenuhan prasarana peternakan yaitu membandingkan jumlah prasarana peternakan yang disediakan dengan jumlah prasarana yang dibutuhkan. Adapun target di tahun 2024 adalah 75%, target pada tahun 2025 adalah 80% dan 85% pada tahun 2026. Target prasarana yang disediakan selama kurun waktu 2024-2026 adalah 1)puskesmas, 2)RPH, dan 3)rearing unit/pembibitan

3. Program penyuluhan pertanian

Indikator dari program penyuluhan pertanian ini adalah persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian. Jumlah kelompok tani yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) adalah sebanyak 145 kelompok tani. Untuk tahun 2024 jumlah kelompok tani yang ditargetkan untuk mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian adalah 20 kelompok tani atau sebesar 13,8%. Untuk tahun 2025 sebanyak 40 kelompok tani atau sebesar 27,6% dan untuk tahun 2026 ditargetkan sebanyak 60 kelompok tani atau sebesar 41,4%.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dibidang Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tiga tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran)

Penetapan kinerja atau ukuran yang akan digunakan untuk mengukur kinerja keberhasilan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang itu sendiri, karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Berikut ini penjabaran Indikator Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagaimana pada Tabel 7.1.

TABEL 7.1  
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA SABARAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RPD
				2021	2022	2024	2025	2026	KINERJA
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	LPE Sektor Pertanian	%			5,54	5,54	5,69	5,74	5,74
I	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	index	-% AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100 - Skor AKE = % AKE x Bobot - Skor PPH masing-masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan	85,70	87,30	88,10	88,20	88,30	88,30
1	Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)	%	Banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) dibandingkan dengan kecukupan energi	100,00	100,54	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Angka Kecukupan Protein (% AKP)	%	Banyaknya protein yang dikonsumsi (kalori) dibandingkan dengan kecukupan protein	102,30	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Pengawasan Pangan Seger	%	Jumlah jenis sampel pangan seger yang diuji dibagi jumlah jenis sampel pangan seger yang termasuk kewenangan pemerintah daerah (3 jenis) dikali seratus persen		N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi Penduduk	kita/kapita/hari	Ketersediaan masing-masing bahan makanan dibagi dengan jumlah penduduk		2800,34	2400	2400	2400	2400
5	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beraslagung sesuai kebutuhan)	%	Jumlah Cadangan Pangan dibagi jumlah target cadangan pangan pemerintah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan dikali 100%		13,043	28,087	33,478	46,522	46,522
II	Produktivitas padi	Ton/ha	Jumlah produksi padi ha (ton/ ha)	N/A	3,04	6,5	6,6	6,7	6,7
III	Produktivitas Susu Sapi Perah	liter/ekor/hari	Jumlah produksi susu sapi perah (liter/ekor/hari)	N/A	11,07	11,88	11,88	11,90	11,90
IV	Peningkatan Produksi Perikanan	%	Persentase peningkatan produksi perikanan	3,19	5,00	0,13	0,13	0,13	0,39
1	Produksi budidaya ikan	Ton/Tahun	Jumlah produksi budidaya ikan (Ton/tahun)	706,48	735,80	751	752	753	753
2	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	Jenis	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha perikanan	N/A	N/A	1	1	1	1
3	Persentase Perneruhan Sarana Pertanian	%	Jumlah sarana pertanian yang disediakan dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah sarana pertanian yang dibutuhkan adalah 1) handtraktor 2) cultivator 3) pompa air 4) handpuyer 5) mesin potong rumput 6) thresher 7) sealer 8) kamason 9) oven	62,50	75	77	80	85	85
4	Persentase Perneruhan Sarana Peternakan	%	Jumlah sarana peternakan yang disediakan dibagi jumlah sarana peternakan yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah sarana peternakan yang dibutuhkan adalah 1) sarana pusketasan 2) sarana RPH 3) sarana raring unit/pembibitan	50,00	75	76	80	85	85

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RPD
				2021	2022	2024	2025	2026	KINERJA
5	Persentase Pemenuhan Prasarana Peranian	%	Jumlah prasarana peranian yang tersedia dibagi jumlah prasarana yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah prasarana peranian yang dibutuhkan adalah 1) jalan usaha tani 2) irigasi.	50,00	75	77	80	85	85
5	Persentase pemenuhan prasarana peternakan	%	Jumlah prasarana peternakan yang tersedia dibagi jumlah prasarana peternakan yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah prasarana peternakan yang dibutuhkan adalah 1) puskesmas 2) RPH 3) Rearing unit/pembibitan.	50,00	75	75	80	85	85
7	Persentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	Jumlah Kasus penyakit hewan ternak yang zoonosis dalam tahun berjalan dibagi jumlah kasus penyakit ternak/ hewan zoonosis tahun lalu kali seratus persen.	16,17	-39,92	8,50	3,00	0,50	3,50
8	Persentase Pengendalian dan Peranggulungan Bencana Peranian yang Terjangkit	%	Jumlah bencana peranian yang diwadekan atau ditangani dibagi dengan jumlah bencana peranian yang terjadi dikali seratus persen.	14,00	60,00	76,00	80,00	86,00	86,00
V	Adopsi Inovasi Teknologi	%	Persentase penerapan inovasi teknologi		68,08	83,3	86,7	100	100
1	Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan inovasi Teknologi Peranian.	%	Persentase jumlah kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi peranian.			53,6	27,6	41,4	41
VI	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bantuan	%	Pendapatan petani penerima bantuan tahun berjalan dikurangi dengan pendapatan petani penerima bantuan t-1 dibagi dengan pendapatan petani penerima bantuan t-1 dikali 100%	20,15	20,15	8,0	8,5	9,0	25,60
1	Persentase Pemenuhan Sarana Peranian	%	Jumlah sarana peranian yang disediakan dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah sarana peranian yang dibutuhkan adalah 1) handtraktor 2) cultivator 3) pompa air 4) handspayer 5) mesin potong rumput 6) thresher 7) sealer 8) kemasan 9) oven.	62,50	75	77	80	85	85
2	Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	%	Jumlah sarana peternakan yang disediakan dibagi jumlah sarana peternakan yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah sarana peternakan yang dibutuhkan adalah 1) sarana puskesmas 2) sarana RPH 3) sarana rearing unit/pembibitan.	50,00	75	75	80	85	85
VII	Produktivitas padi	Ton/ha	Jumlah produksi padi/ ha (ton/ ha)	N/A	8,04	8,5	8,6	6,7	6,7
VIII	Produktivitas Susu Sapi Perah	liter/ ekor/ hari	Jumlah produksi susu sapi perah (liter/ ekor/ hari)	N/A	11,67	11,80	11,85	11,90	11,90
IX	Peningkatan Produksi Perikanan	%	Jumlah sarana pertanian/ peternakan yang difasilitasi dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen.	3,19	3,00	0,13	0,13	0,13	0,30
1	Produksi budidaya ikan	Ton/Tahun	Jumlah Produksi budidaya ikan (Ton/tahun)	706,48	735,90	751	752	763	753
2	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan	Jenis	Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha perikanan	N/A	N/A	1	1	1	1
3	Persentase Pemenuhan Sarana Peranian	%	Jumlah sarana peranian yang disediakan dibagi jumlah sarana yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah sarana peranian yang dibutuhkan adalah 1) handtraktor 2) cultivator 3) pompa air 4) handspayer 5) mesin potong rumput 6) thresher 7) sealer 8) kemasan 9) oven.	62,50	75	77	80	85	85
4	Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	%	Jumlah sarana peternakan yang disediakan dibagi jumlah sarana peternakan yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah sarana peternakan yang dibutuhkan adalah 1) sarana puskesmas 2) sarana RPH 3) sarana rearing unit/pembibitan.	50,00	75	75	80	85	85

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN DAN PROGRAM	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI		TARGET			CAPAIAN AKHIR TAHUN RPD
				2021	2022	2024	2025	2026	KINERJA
5	Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	%	Jumlah prasarana peternakan yang tersedia dibagi jumlah prasarana yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah prasarana peternakan yang dibutuhkan adalah 1) jalan usaha tani 2) Irigasi.	50,00	75	77	80	85	85
6	Persentase pemenuhan prasarana pemukiman	%	Jumlah prasarana pemukiman yang tersedia dibagi jumlah prasarana pemukiman yang dibutuhkan dikali seratus persen. Jumlah prasarana pemukiman yang dibutuhkan adalah 1) puskesmas 2) RPH 3) Rearing unit/pembibitan.	50,00	75	75	80	85	85
7	Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus	%	Jumlah Kasus penyakit hewan/ ternak yang zoonosis dalam tahun berjalan dibagi jumlah kasus penyakit ternak/ hewan zoonosis tahun lalu kali seratus persen.	16,17	39,92	8,50	3,00	0,50	3,50
8	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Terjangkit	%	Jumlah bencana pertanian yang dihindarkan atau diurangi dibagi dengan jumlah bencana pertanian yang terjadi dikali seratus persen.	14,00	60,00	75,00	80,00	85,00	85,00

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2022

Berdasarkan table 7.1 diatas dapat dilihat bahwa indikator kinerja sasaran pada Dinas Pangan dan Pertanian yang mengacu pada RPD 2024-2026 terdiri atas 6(enam) indicator yaitu :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dengan target 86,10 (indeks) pada tahun 2024, 86,20 (indeks) pada tahun 2025 dan 86,30 (indeks) pada tahun 2026. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ini didukung oleh program prioritas dengan indicator program :
  - a. Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE)
  - b. Persentase Angka Kecukupan Energi (% AKP)
  - c. Persentase Pengawasan Pangan SegarAdapun target dari masing-masing indicator program diatas selama kurun waktu 2024-2026 adalah 100 % tiap tahunnya.
2. Produktivitas Padi  
Target produktivitas padi untuk kurun waktu 2024-2026 secara berturut-turut adalah 6,5 ton/ha, 6,6 ton/ha dan 6,7 ton/ha di akhir periode renstra
3. Produktivitas Susu Sapi Perah  
Target produktivitas susu sapi perah untuk kurun waktu 2024-2026 secara berturut-turut adalah 11,80 liter/ekor/hari, 11,85 liter/ekor/hari dan 11,90 liter/ekor/hari di akhir periode renstra
4. Peningkatan Produksi Perikanan  
Target persentase peningkatan produksi perikanan untuk tahun 2024-2026 adalah meningkat 0,13% setiap tahunnya.  
Adapun indicator program yang mendukung produktivitas padi, produktivitas susu sapi perah dan peningkatan produksi perikanan adalah sebagai berikut :
  - a. Produksi budidaya ikan
  - b. Jumlah jenis olahan perikanan
  - c. Persentase pemenuhan sarana pertanian
  - d. Persentase pemenuhan sarana peternakan
  - e. Persentase pemenuhan prasarana pertanian
  - f. Persentase pemenuhan prasarana peternakan
  - g. Persentase penurunan penyakit temak/hewan/kasus
  - h. Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang tertangani.



5. Adopsi inovasi teknologi

Persentase penerapan inovasi teknologi untuk tahun 2024 adalah 33,3%, tahun 2025 adalah 66,7% dan tahun 2026 adalah 100%. Adapun indikator program yang mendukung adopsi inovasi teknologi adalah persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan inovasi teknologi pertanian dengan target pada tahun 2024 adalah 13,8%, tahun 2025 adalah 27,6% dan tahun 2026 adalah 41,4%

6. Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos

Target persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos untuk tahun 2024 adalah 8%, tahun 2025 adalah 8,5% dan tahun 2026 adalah 9%. Untuk mencapai target persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos didukung oleh indikator program :

- a. Persentase pemenuhan sarana pertanian
- b. Persentase pemenuhan sarana peternakan

Definisi operasional cara pengukuran indikator kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang ada 6 macam, yaitu:

1. Cara pengukuran indikator skor pola pangan harapan adalah:
  - % AKE masing-masing kelompok pangan = energi masing-masing kelompok pangan/ total energi kelompok pangan x 100;
  - Skor AKE = % AKE x Bobot;
  - Skor PPH masing- masing kelompok pangan = skor AKE dibandingkan skor maksimal, Jika skor AKE > dari skor maksimal maka digunakan skor maksimal, Jika skor AKE < dari skor maksimal maka digunakan skor AKE; dan
  - Skor PPH total = jumlah dari keseluruhan skor PPH 9 kelompok pangan.
2. Cara pengukuran indikator produktifitas padi adalah produksi padi dalam setahun (ton) dibagi luas tanam padi (Ha).
3. Cara pengukuran produktivitas susu sapi perah adalah jumlah total produksi susu sapi dalam setahun dibagi dengan jumlah populasi sapi perah betina produktif.
4. Cara pengukuran peningkatan produksi perikanan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah produksi perikanan tahun } n - \text{jumlah produksi perikanan tahun } n-1}{\text{jumlah produksi perikanan tahun } n-1} \times 100\%$$

5. Cara pengukuran adopsi inovasi teknologi adalah jumlah jenis adopsi inovasi teknologi yang diterapkan dibagi dengan jumlah inovasi teknologi yang diajarkan. Adapun jenis inovasi teknologi yang diajarkan adalah sebanyak 3(tiga) jenis , yaitu :
  - a. Perbaikan teknologi budidaya
  - b. Pengurangan pemakaian bahan kimia
  - c. Diversifikasi olahan produk pertanian dan perikanan

6. Cara pengukuran persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos adalah

$$\frac{\text{Jumlah pendapatan petani penerima bansos th } n - \text{Juml pendapatan petani penerima bansos } n-1}{\text{Jumlah pendapatan petani penerima bansos tahun } n-1} \times 100\%$$

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis disusun sebagai arah pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi lingkungan internal maupun eksternal, yang terus berkembang seiring dengan perubahan yang sangat cepat pada era global ini.

Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 dan Rancangan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan telah disusunnya Renstra ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Kerja (Renja) dan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Renstra ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan yaitu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat menunjang pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang sekaligus menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari secara proporsional.

Padang Panjang, April 2023

**Kepala Dinas Pangan dan Pertanian  
Kota Padang Panjang**



**ADE NAFRITA ANAS, SP. MP**

**Pembina Utama Muda,**

**NIP. 19710520 199903 2 004**